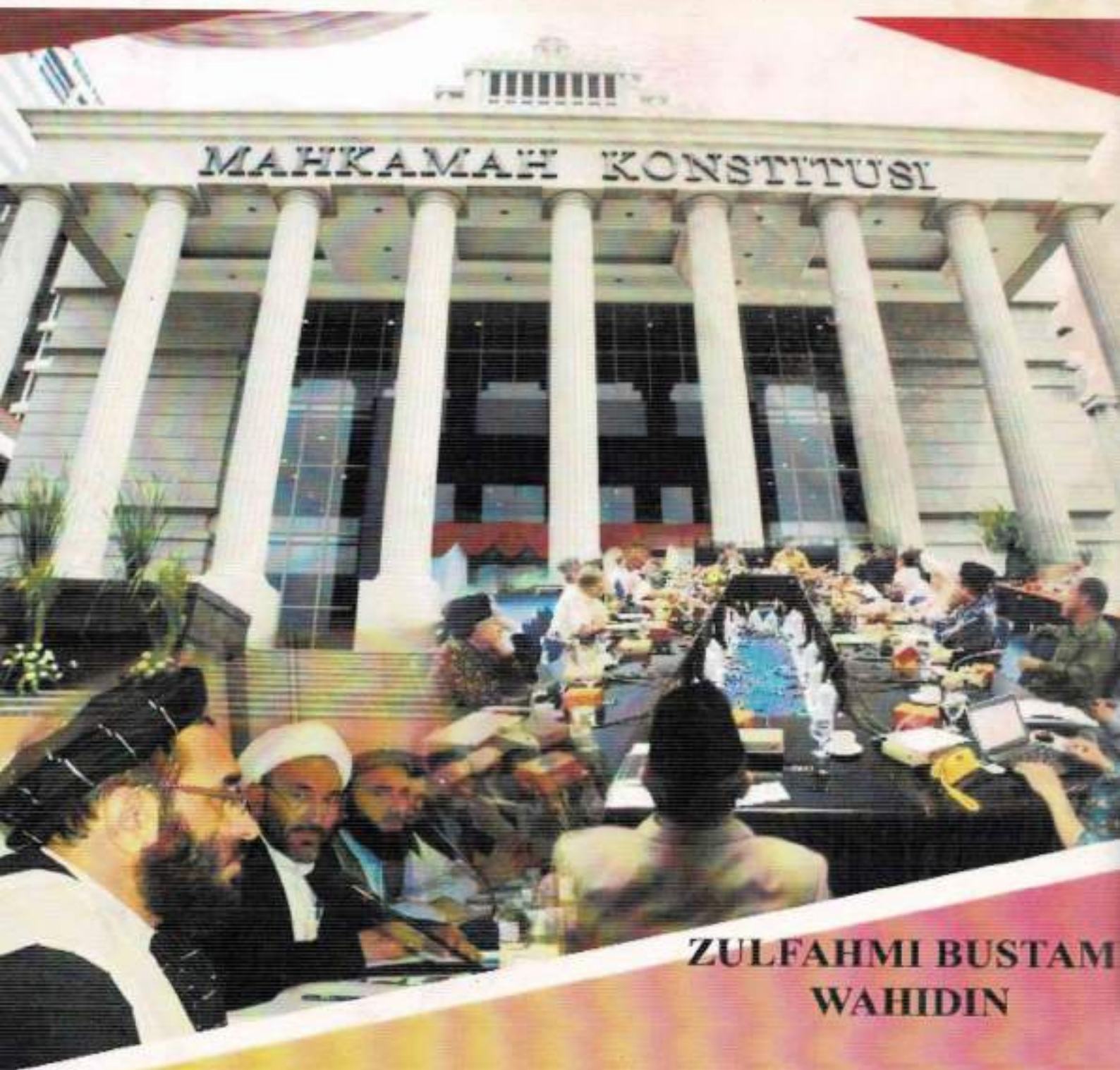


**STUDI ANALISA PERSEPSI ULAMA  
DI PEKANBARU TERHADAP PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU-VIII/2010  
TENTANG STATUS ANAK DI LUAR NIKAH**



**ZULFAHMI BUSTAM  
WAHIDIN**



**LEMBAGA PENELITIAN & PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
'TAHUN 2015**





UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
هيئة البحوث وخدمة المجتمع  
INSTITUTE FOR RESEARCH AND COMMUNITY SERVICE

## PENGESAHAN

Nomor : Un.04/L.I/TL.01/ 16 /2015

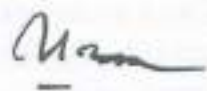
Judul : Studi Analisis Persepsi Ulama di Pekanbaru terhadap Putusan Mahkamah  
Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak di Luar Nikah  
Peneliti : Zulfahmi Bustami, M.Ag  
Wahidin, M.Ag  
Pangkat/Gol : Penata Tk. I / III.d  
Jabatan : Lektor  
Fakultas/Unit : Syariah dan Hukum  
Hp/Telp : 08127650281  
Bidang Ilmu : Social Science  
Jenis Penelitian : Terapan  
Bentuk Penelitian : Kelompok  
Lokasi : Propinsi Riau  
Waktu : Bulan Juni s.d Desember 2015

Telah diseminarkan pada  
Hari/Tanggal : Senin/23 November 2015

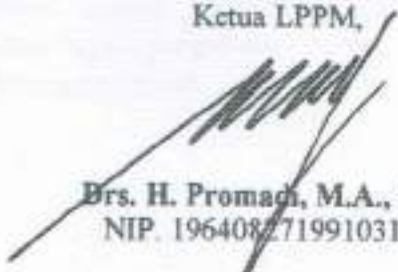
Narasumber

  
Prof. Dr. H. Mahdini, MA  
NIP. 196103131986031002

Peneliti Utama

  
Zulfahmi Bustami, M.Ag  
NIP. 197101011997031010

Mengetahui:  
An. Rektor  
Ketua LPPM,

  
Drs. H. Promadi, M.A., Ph.D.  
NIP. 196408271991031009



## ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh putusan MK dalam perkara NO 46 /PUU-VIII/2010 yang membawa perubahan dalam tatanan hukum di Indonesia. Putusan ini pada hakikatnya terkait dengan tanggung jawab ayah biologis terhadap anak biologis terutama dalam hubungan keperdataan yaitu kewajiban nafkah. Putusnya hubungan keperdataan ayah biologis dengan anak di satu sisi mengakibatkan hilangnya hak seorang anak untuk memperoleh nafkah dari ayah biologisnya sehingga di satu sisi akan merugikan anak, namun di sisi lain sebagai efek jera untuk menghindari terjadinya perbuatan zina. Fenomena ini juga memungkinkan akan berpotensi meningkatkan perzinahan di Indonesia, terutama di kota Pekanbaru, taitu bila dikaitkan dengan keberadaan Pekanbaru sebagai salah satu kota yang juga memiliki fenomena eksploitasi seksual di berbagai tempat hiburan. Putusan MK tentang status anak luar kawin ini, memberikan hak dan hubungan hukum keperdataan bagi ayah biolgis secara nyata merupakan bentuk dinamika hukum Islam yang harus ditanggapi oleh para ulama. Bila ulama tidak memahami dinamika hukum tersebut dan tidak menyadari implikasi dari suatu perubahan hukum akan hilanglah fungsi-fungsi krusial di atas.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan hubungan hukum antara ayah dan anak biologis berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi NO 46 /PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Di Luar Kawin dan untuk mengetahui persepsi para ulama pekanbaru terhadap putusan MK tersebut serta mengetahui implikasi yuridis dan sosiologis dari Putusan MK bentuk tanggung jawab ayah terhadap anak biologis dalam perbandingan hukum Islam dan putusan Mahkamah Konstitusi.

Hasil penelitian ini adalah putusan MK menyatakan bahwa seorang ayah biologis tetap memiliki kekuasaan hukum atas anaknya selama tidak dicabut oleh pengadilan. Untuk itu ditemukannya pandangan para ulama di Pekanbaru bahwa keabsahan pernikahan masih didasarkan pada norma yang diatur dalam hukum Islam. Dan berpandangan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah tidak memiliki hubungan keperdataan secara sempurna dengan ayah biologisnya dan hubungan tersebut hanya dengan ibu dan keluarga ibunya. Selanjutnya implikasi dari putusan MK ini dapat dilihat secara yuridis maupun sosiologis. Secara yuridis putusan MK ini akan memberikan implikasi berupa ketidaksesuaian antara hukum Islam dan Putusan MK sehingga akan menjadi kontraproduktif dengan upaya positivisasi hukum Islam. Demikian juga secara yuridis putusan MK akan berimplikasi pada asas kepastian hukum tentang kejelasan status keabsahan perkawinan serta harmonisasi dalam positivisasi hukum dimana ada kecenderungan akan berbenturan dengan UU peradilan agama, UU perkawinan dan UU tentang kependudukan. Sementara dalam perspektif sosiologis putusan MK ini akan berimplikasi pada munculnya pergaulan bebas, konflik rumah tangga serta ketidakharmonisan dalam masyarakat.



## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Segala puji dan syukur selalu diucapkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karuniaNya kepada penulis sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam tidak lupa juga diucapkan semoga tercurah buat penghulu alam Nabi Muhammad SAW dengan ucapan *Allahumma shalli 'ala saidina Muhmmad wa 'ala ali Muhammad*, yang telah berjuang membawa dan menyampaikan risalah Islam kepada ummat manusia dan berlaku hingga hari akhir.

Penulisan penelitian yang berjudul: **“STUDI ANALISA TERHADAP PERSEPSI ULAMA PEKANBARU TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 46 /PUU-VIII/2010 TENTANG STATUS ANAK DI LUAR KAWIN”**. Dimaksud untuk melengkapi tugas akademik penelitian dosen sebagai implementasi dari tri darma perguruan tinggi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA Riau tahun 2015. Dalam menyelesaikan penelitian ini banyak sekali perhatian, biaya, bantuan, bimbingan, motivasi serta pikiran dari berbagai pihak yang penulis dapatkan. Maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H.M. Munzir Hitami, MA, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau, beserta Wakil Rektor I: Dr. Hj. Helmiati, M.Pd, Wakil Rektor II: Dr. H. Akhyar Hamzah, M.Ag dan Wakil Rektor III: Dr. Thohirin, M.Pd.



2. Bapak Drs. H. Promadi, M.A., Ph.D., selaku Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UIN Suska Riau, beserta para staffnya, yang telah memberi kesempatan pada peneliti melakukan penelitian ini.
3. Bapak Dr. H. Mawardi Muhammad Sale, Lc, MA, selaku Nara Sumber seminar awal yang memberikan bimbingan dalam perbaikan profosal dan fokus penelitian. Bapak Prof. Dr. H. Mahdini, MA selaku Nara Sumber seminar hasil yang memberikan bimbingan dalam perbaikan penulisan penelitian ini.
4. Sahabat- sahabat dosen di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya dan semua pihak yang telah banyak membantu.

Untuk itu, penulis sangat mengharapkan segala kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan penelitian ini dimasa yang akan datang. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih.

Pekanbaru, 10 Desember 2015  
Penulis,

Zulfahmi Bustami  
Wahidin



## DAFTAR ISI

Pengesahan .....	ii
Abstrak .....	iii
Kata Pengantar .....	iv
Daftar Isi .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II STATUS ANAK LUAR NIKAH DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF</b>	
A. Stautus Anak Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Islam .....	9
1. Hubungan Keperdataan Anak Luar Nikah Dan Ayah Biologis .....	9
2. Kedudukan Nasab Anak Dalam Hukum Islam .....	17
B. Status Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Hukum Positif.....	32
C. Pergeseran Hukum Keabsahan Status Hukum Pernikahan.....	38
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	55
B. Teknik Pengumpulan Data.....	56
C. Analisis Data .....	59
<b>BAB IV PERSEPSI ULAMA DI PEKANBARU TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 46 /PUU-VIII/2010 TENTANG STATUS ANAK DI LUAR KAWIN</b>	
A. Persepsi Para Ulama Terhadap Putusan MK .....	61
B. Implikasi yuridis dan Sosiologis dari Putusan MK NO 46 /PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Di Luar Kawin .....	80
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	94
B. Saran-Saran .....	96

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam diatur bahwa anak di luar nikah tidak dapat dihubungkan dengan ayahnya, melainkan hanya kepada ibunya dan keluarga ibunya. Namun demikian, terdapat perbedaan antara keduanya dimana dalam ketentuan dalam KUHP status anak dapat dihubungkan pada ayahnya apabila anak tersebut mendapat pengakuan sekaligus pengesahan. Dan akibat dari pengakuan dan pengesahan tersebut akan timbul hak dan kewajiban timbal balik antara anak dengan orang tuanya.

Berbeda dengan ketentuan KUHP, Hukum Islam tetap menganggap anak hasil zina adalah anak yang tidak sah. Anak luar nikah adalah anak yang lahir dari hasil hubungan kelamin luar nikah. Dalam Hukum Islam anak yang dapat dianggap anak di luar nikah adalah:

- 1) Anak *zina*, adalah anak yang lahir dari hasil hubungan kelamin tanpa pernikahan, karena perbuatan yang dilakukan oleh orang yang menyebabkan kelahiran anak tersebut.
- 2) Anak *mula'ana*, adalah anak yang dilahirkan oleh seorang isteri yang mana keberadaan anak itu dibantah oleh suami sebagai anaknya dan menuduh isterinya telah berbuat zina dengan pria lain dengan cara melakukan sumpah li'an terhadap isterinya.



- 3) Anak *syubhat*, adalah anak yang dilahirkan dari seorang wanita yang digauli dengan cara syubhat, yang dimaksud dengan syubhat dalam hal ini, menurut jawad mughaniyah yaitu seorang laki-laki menggauli seorang wanita yang haram atasnya karena tidak tahu dengan keharaman itu.<sup>1</sup>

Oleh karena itu stastus anak di luar nikah akan berakibat hukum sebagai berikut:

- a. Tidak ada hubungan nasab kepada laki-laki yang mencampuri ibunya. Anak di luar nikah tidak dapat dihubungkan nasabnya dengan ayah biologisnya, melainkan hanya kepada ibunya. Secara yuridis formal ayah tidak wajib memberikan nafkah kepada anak itu. Jadi, hubungan kekerabatan hanya berlangsung secara manusiawi, bukan secara hukum.
- b. Tidak ada saling mewaris. Karena tidak ada hubungan nasab dengan ayah biologisnya, maka mereka tidak dapat saling mewaris satu sama lain, termasuk dari kerabat terdekat ayahnya. Anak zina hanya dapat mewaris dari pihak ibu dan kerabat ibunya.
- c. Tidak dapat menjadi wali nikah. Wali dalam pernikahan adalah orang-orang yang tergolong asabah dalam waris. Oleh karena asabah dalam waris juga berdasarkan nasab, maka ayah biologis tidak dapat menjadi wali nikah bagi anak perempuan hasil zina. Sebagai akibatnya, ia dinikahkan oleh hakim.

Dalam perkembangan hukum di Indonesia keberlakuan hukum tentang hubungan ayah biologis dengan anak biologis sebagai hasil pembuahan diluar pernikahan tersebut, memasuki diskursus baru ketika muncul putusan Mahkamah

---

<sup>1</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh lima mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2007), hlm. 388.

Konstitusi terkait uji materiil UU Perkawinan. Putusan Mahkamah Konstitusi pada perkara nomor 46 /PUU-VIII/2010 yang mereview ketentuan Pasal 2 ayat (2) juga ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang status hukum anak yang lahir di luar perkawinan.

Sebelum keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, hukum yang berlaku tentang kedudukan anak luar nikah didasarkan pada Pasal 2 ayat (2) dan juga Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 senada dengan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam. Selama itu pula, masyarakat muslim Indonesia telah nyaman karena substansinya tidak bertentangan bahkan sejalan dengan Syari'at Islam. Sebagai aturan yang sudah diyakini dan dianut sejak lama, aturan yang sejalan dengan syariat Islam ini berhadapan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang berbeda dengan aturan hukum yang diyakini masyarakat sehingga mengundang polemik terutama dalam masyarakat muslim.

Pasal 43 ayat (1) yang telah di-review oleh putusan Mahkamah Konstitusi hanya berlaku dalam hubungan hukum keperdataan antara anak dengan ayah biologisnya, selain hubungan keperdataan perwalian dalam perkawinan dan selain hubungan keperdataan dalam kewarisan. Dengan demikian putusan yang memberikan hak perdata kepada anak hasil luar nikah merupakan perkembangan hukum yang bernilai positif jika dilihat dari aspek Hak Asasi Manusia, namun juga dapat dinilai negative karena menimbulkan kontradiksi antara hukum positif



dan hukum. Sementara kondisi sosiologis masyarakat Indonesia ialah mayoritas beragama.<sup>2</sup>

Di samping itu, penerapan hukum Islam dalam bentuk positivisasi hukum perkawinan yang diadaptasi dalam UU perkawinan maupun KHI dianggap telah mampu menempatkan kepentingan hukum umat Islam dalam sistem hukum nasional. Ditinjau dari sosiologi hukum, fungsi hukum sebagai kontrol sosial mempunyai 4 prasarat fungsional dari suatu system hukum, yaitu (1) masalah dasar legitimasi, yakni menyangkut ideology yang menjadi dasar penataan aturan hukum, (2) masalah hak dan kewajiban masyarakat yang menjadi sasaran regulasi hukum beserta proses hukumnya, (3) masalah sanksi dari lembaga yang menerapkan sanksi tersebut, dan (4) masalah kewenangan aturan hukum.<sup>3</sup>

Keempat prasarat tersebut telah diakomodir dalam sistem hukum Islam, karena ketentuan hukum Islam berdasarkan ketentuan hukum yang idiologis, terdapatnya hak dan kewajiban yang berkonsekwensi pada penegakan proses hukumnya jika terjadi penyelewengan terhadap hak dan kewajiban, sanksi dari tindakan hukum yang dilakukan dan masalah kewenangan aturan hukum sangat memungkinkan untuk berubah.

Setiap hukum akan membentuk fungsinya di dalam masyarakat termasuk hukum Islam, dan menurut A.G. Peter paling sedikit ada 3 (tiga) perspektif fungsi hukum di dalam masyarakat. *Pertama* perspektif kontrol sosial dari hukum yang

---

<sup>2</sup> Jurnal Info Singkat Hukum Vol. IV, No. 06/II/P3DI/Maret/2012, Prianter Jaya Hairi, *Status Keperdataan Anak Diluar Nikah Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*, Jakarta: Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, hlm. 1-2

<sup>3</sup> Tom Campbell. *Tujuh Teori Sosial : Sketsa Penilaian Dan Perbandingan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1994) hlm. 220

merupakan salah satu dari konsep-konsep yang paling banyak digunakan dalam studi-studi kemasyarakatan. Dalam perspektif ini dapat dikatakan bahwa tidak ada masyarakat yang mampu hidup langgeng tanpa adanya kontrol sosial dari hukum sebagai sarannya. *Kedua*, perspektif *sosial engineering*, yang merupakan tinjauan yang paling banyak dipergunakan oleh para pejabat untuk menggali sumber-sumber kekuasaan apa yang dapat di mobilisasi dengan menggunakan hukum sebagai mekanismenya. *Ketiga*, perspektif emansipasi masyarakat terhadap hukum. Perspektif ini merupakan tinjauan dari bawah terhadap hukum yang meliputi objek studi seperti misalnya kemampuan hukum sebagai sarana penunjang aspirasi masyarakat, budaya hukum, kesadaran hukum, penegakan hukum dan lain-lain.<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, maka keberadaan putusan MK dalam perkara NO 46 /PUU-VIII/2010 akan membawa perubahan dalam tatanan hukum di Indonesia. Putusan ini pada hakikatnya terkait dengan tanggung jawab ayah biologis terhadap anak biologis terutama dalam hubungan keperdataan yaitu kewajiban nafkah. Putusnya hubungan keperdataan ayah biologis dengan anak di satu sisi mengakibatkan hilangnya hak seorang anak untuk memperoleh nafkah dari ayah biologisnya sehingga di satu sisi akan merugikan anak, namun di sisi lain sebagai efek jera untuk menghindari terjadinya pembuahan di luar pernikahan (sebagai akibat perbuatan zina).

Fenomena di atas juga dimungkinkan akan berpotensi meningkatkan perzinahan di kota Pekanbaru terutama bila dikaitkan dengan keberadaan

---

<sup>4</sup> Ronny Soemitro. *Studi Hukum Dalam Masyarakat*. (Bandung: Alumni, 1985 ) hlm. 10



Pekanbaru sebagai salah satu kota yang juga memiliki fenomena eksploitasi seksual di berbagai tempat hiburan di Pekanbaru. Hal ini terkait dengan posisi strategis kota Pekanbaru sebagai salah satu titik pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri terutama Malaysia dan Singapura. Hal ini terindikasi dengan banyaknya perusahaan yang bergerak di bidang pengiriman tenaga kerja Indonesia (PJTKI) yang ada di kota Pekanbaru dan adanya penangkaran sementara TKI terutama tenaga kerja wanita di Pekanbaru. Walaupun hanya ada sedikit data yang menyatakan bahwa Pekanbaru juga merupakan daerah pengirim, tetapi ada beberapa indikasi adanya perempuan dan anak perempuan yang ditrafik berdasarkan informasi dari LSM pemberi layanan di Pekanbaru. Mudah-mudahan memperoleh uang dari pelacuran dan tidak adanya pilihan lain untuk mendapatkan penghasilan, mendorong para remaja yang ada di kota Pekanbaru melakukan pekerjaan sambil sebagai Penjaja Seks Komersial. Dengan beberapa pola input seperti ini berimplikasi pada munculnya beberapa model tempat terjadinya transaksi seks komersial di kota Pekanbaru. Secara umum transaksi seks komersial di kota Pekanbaru terjadi dalam tiga bentuk. Pertama transaksi seks komersial yang terjadi di lokasi pelacuran yang berada di Kampung Baru kecamatan Tenayan Raya yang biasa disebut dengan lokasi Teleju. Di lokasi ini terjadi transaksi seks komersial dengan dalih tempat hiburan yang juga menyediakan PSK sekaligus tempat bagi berlangsungnya aktifitas seks komersial tersebut. Kedua, transaksi seks komersial yang terjadi di berbagai tempat hiburan yang berdalih sebagai bar atau karaoke yang menyediakan wanita sebagai pelayan yang pada umumnya juga bisa dilanjutkan dengan transaksi seks



komersial. Ketiga, transaksi seks komersial yang terjadi di lingkungan perumahan yang memiliki tingkat keamanan tertentu dan legalisasi dari lingkungan setempat dengan dalih sebagai tempat kos-kosan ataupun panti pijat. Hanya saja dalam pola yang kedua dan ketiga ini kegiatan seks komersil tidak dilakukan di tempat tersebut dan pada umumnya dilanjutkan di beberapa hotel yang ada di kota Pekanbaru.

Untuk itu mengingat bahwa ulama menduduki posisi penting dalam masyarakat Islam terutama karena sebagai figur ilmunan yang menguasai dan memahami ajaran-ajaran agama, dan juga sebagai penggerak, motivator dan dinamisator masyarakat ke arah pengembangan dan pembangunan umat, juga berfungsi sebagai pengawal moralitas ditengah degradasi moral yang melanda masyarakat. Ulama i memiliki peran penting untuk mencegah masyarakat dari pergaulan bebas dan juga menyelesaikan persoalan yang terkait dengan hubungan hukum dalam rumah tangga. Untuk itu ulama harus memahami perkembangan dan dinamika hukum terutama hukum positif yang ada di kalangan umat terutama terkait dengan perkembangan hukum Islam di tengah keluarga. Putusan MK tentang yang memberikan hak dan hubungan hukum keperdataan bagi ayah biologis secara nyata merupakan bentuk dinamika hukum Islam yang harus ditanggapi oleh para ulama. Bila ulama tidak memahami dinamika hukum tersebut dan tidak menyadari implikasi dari suatu perubahan hukum akan hilanglah fungsi-fungsi krusial di atas.

Dengan demikian putusan MK ini menarik untuk diteliti lebih lanjut terkait tanggungjawab sehingga penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam penelitian yang berjudul: **STUDI ANALISA TERHADAP PERSEPSI ULAMA DI PEKANBARU TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 46 /PUU-VIII/2010 TENTANG STATUS ANAK DI LUAR KAWIN**



## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana hubungan hukum antara ayah dan anak biologis berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi?
2. Bagaimana Persepsi Para Ulama Pekanbaru Terhadap Putusan MK tentang Hubungan Anak Luar Nikah dan Ayah Biologis?
3. Bagaimana Implikasi yuridis dan Sosiologis dari Putusan MK NO 46 /PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Di Luar Kawin bentuk tanggung jawab ayah terhadap anak biologis dalam perbandingan hukum Islam dan putusan Mahkamah Konstitusi?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini ditulis dengan tujuan:

- a. Untuk mengetahui hubungan hukum antara ayah dan anak biologis dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi.
- b. Mengetahui perbandingan hukum tanggung jawab ayah terhadap anak biologis ditinjau dari hukum Islam dan hukum di Indonesia

### **2. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah khazanah pemikiran hukum terutama kajian hukum normatif dalam kaitannya dengan persoalan hubungan dan tanggungjawab ayah biologis dalam hukum keluarga yang bersumber dari hukum Islam dan hukum Positif.

## **BAB II**

### **STATUS ANAK LUAR KAWIN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

#### **A. STATUS ANAK LUAR KAWIN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

##### **1. Hubungan Keperdataan Anak Luar Nikah Dan Ayah Biologis Dalam Perspektif Hukum Islam**

Hukum Islam yang bersumber dan ditetapkan oleh Allah, tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan-hubungan lainnya karena manusia yang hidup di dalam masyarakat itu mempunyai berbagai hubungan.<sup>5</sup> Menurut ajaran Islam, anak adalah amanah Allah dan tidak bisa dianggap sebagai harta benda yang bisa diperlakukan sekehendak hati oleh orang tua. Sebagai amanah anak harus dijaga sebaik mungkin oleh yang memegangnya, yaitu orang tua. Anak adalah manusia yang memiliki nilai kemanusiaan yang tidak bisa dihilangkan dengan alasan apa pun. Dengan demikian dalam Islam pada dasarnya tidak dijumpai pengelompokan anak di depan hukum.

Pengelompokan anak di depan hukum diakibatkan pelanggaran norma oleh orang tuanya, yang patut dibebankan kepada kedua orang tuanya yang telah melanggar norma agama. Dengan demikian Islam memiliki kepentingan hukum untuk mengatur lalu-lintas hubungan nasab manusia. Dari sudut ini, Islam pada

---

<sup>5</sup>Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 38



garis besarnya membagi anak dalam dua kategori yakni *Anak Syar'iy* dan *Anak Thabi'iy*. Dikatakan anak *syar'iy* karena agama menetapkan adanya hubungan nasab secara hukum dengan orang tuanya. Dan disebut anak *thabi'iy* karena secara hukum anak tersebut dianggap tidak memiliki hubungan nasab dengan orang tuanya. Anak *syar'iy* mencakup tiga kategori yakni: (1) anak yang dilahirkan suami isteri dari pernikahan yang sah, (2) anak yang dilahirkan dari suami isteri yang terikat dalam pernikahan yang fasid sebelum dinyatakan kefasidannya, (3) anak yang dilahirkan akibat hubungan *syubhat* (*wathi syubhat*). Anak yang dilahirkan dari tiga akibat di atas dinamakan anak *syar'iy* yang secara hukum memiliki pertalian nasab dengan orang tua laki-lakinya dan tetap berlaku bagi keduanya hak dan kewajiban selaku orang tua terhadap anaknya dan sebaliknya.<sup>6</sup>

Di luar tiga kategori di atas, anak yang lahir disebut anak *thabi'iy* (anak di luar nikah) yang secara hukum tidak memiliki hubungan nasab dengan bapaknya. Ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu yang melahirkan berdasarkan keumuman hadis *al-Waladi lil Firasy*.<sup>7</sup>

Sebagai akibat dari perkawinan yang sah, muncul hubungan hukum antara anak yang dilahirkan dari pernikahan sah, memiliki hubungan keperdataan secara sempurna dengan kedua orang tuanya. Hubungan keperdataan yang dimaksud meliputi hak nasab (garis keturunan) anak dihubungkan kepada ayah (dalam Islam), hak pemenuhan nafkah dari orang tua terhadap anak, hak pemeliharaan

---

<sup>6</sup>M. Thahir Maloko, *Anak Sah dan Anak Luar Nikah* dalam jurnal Al-Risalah, Volume 10 Nomor 1 Mei 2010, hlm. 45

<sup>7</sup>*Ibid.*

dan pendidikan (hadhanah), hak saling mewarisi, hak perwalian nikah bagi ayah atas anak perempuan, dan hak-hak keperdataan lainnya.

Namun di sisi lain, tanggung jawab ayah biologis dalam kewajiban nafkah sebagaimana dijelaskan secara umum dan pada dasarnya tidak mengkaitkan persoalan ini dengan hubungan hukum antara anak dan ayah biologisnya, sebagaimana dalam al-Quran pada surat an-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ<sup>8</sup>  
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ<sup>9</sup> وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ  
وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ<sup>10</sup> فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا<sup>11</sup> إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا  
كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka) wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa para suami merupakan pemimpin, pemelihara dan pendidik isteri-isteri mereka tentang berbagai kewajiban yang harus ditunaikan isteri, baik terhadap Allah maupun kepada suami dan anak-anaknya. Allah memberikan kelebihan kepada laki-laki karena mereka yang memberikan mahar, nafkah dan pemenuhan kebutuhan pangan isteri.<sup>8</sup>

<sup>8</sup>Wahbah al-Zuhailly, *Tafsir al-Munir*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1991), hlm. 285



Kepemimpinan laki-laki dalam kehidupan rumah tangga dibangun di atas dua hal sebagaimana lanjutan ayat tersebut *bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di*, pengertiannya adalah bahwa laki-laki melebihi kelebihan dari perempuan. Beraneka macam cara mufassir dalam mengungkapkan sisi-sisi kelebihan laki-laki tersebut sebagaimana dimaklumi. Namun yang terpenting dalam hubungannya dalam kehidupan rumah tangga adalah laki-laki secara fisik dan mental memiliki kelebihan dari perempuan. Karena itulah kata Zuhailiy para nabi, rasul, imam, azan, hak thalak dipegang oleh laki-laki.<sup>9</sup>

*Arrijalu qawwamuna 'alan nisak'*, maksudnya menurut Wahbah Zuhailiy bahwa laki-lakilah yang bertanggung jawab, memelihara, memimpin, mendidik dan mengayomi perempuan. Tegasnya lanjut Zuhailiy yang dimaksud dengan al-Qawwam adalah ar-riyah (kepemimpinan) tasyir syu'un al-usrah wal manzil (menggerakkan urusan keluarga dan rumah tangga) secara benar. Dalam perkataan Allah: *Wabima anfaqu min amwalihim*, pengertiannya bahwa kepemimpinan itu diamanahkan Allah kepada laki-laki karena mereka yang memikul beban tanggung jawab nafkah. Dari bagian ayat yang terakhir ini dapat dipahami bahwa yang bertanggung jawab memberikan nafkah dalam rumah tangga adalah laki-laki (suami). Jadi suami sebagai pemimpin mempunyai dua tanggung jawab, moril dan materil. Tanggung jawab moril adalah memberikan perlindungan dan pengayoman kepada isterinya, dan tanggung jawab materi adalah memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan isteri.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>*Ibid*

<sup>10</sup>*Ibid*. hlm. 286

Terkait dengan tanggungjawab ayah biologis terhadap anak biologis dalam hukum Islam didasarkan pada keabsahan perkawinan itu sendiri. Sebagaimana terdahulu keabsahan perkawinan didasarkan pada pemenuhan unsur rukun perkawinan yang dijelaskan secara berbeda dalam mazhab hukum Islam. Menurut Ulama Hanafiyah rukun perkawinan hanya ijab dan qabul saja. Imam Malik menjadikan mahar sebagai rukun perkawinan sedangkan saksi bukan sebagai rukun perkawinan, ulama Syafi'iyah dua orang saksi dijadikan sebagai rukun pernikahan sedangkan mahar bukan sebagai rukun pernikahan, begitu juga ulama Hanafiyah yang menyatakan bahwa rukun perkawinan hanya ijab qabul saja, sedangkan yang lainnya bukan sebagai rukun perkawinan. Imam Syafi'i sendiri dalam Al-Umm tidak menjelaskan tentang rukun perkawinan. Dengan demikian dapat diketahui bahwa diantara ulama Mazhab sendiri tidak ada kesepakatan tentang rukun perkawinan, oleh karena itu rukun perkawinan yang sudah masyhur di masyarakat atau sebagaimana yang tercantum pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam belumlah final, tetapi ada kemungkinan untuk diubah baik ditambah atau dikurang sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan bagi masyarakat itu sendiri. Calon mempelai pria dan calon mempelai wanita dijadikan sebagai rukun perkawinan, bukan karena ada petunjuk dari Al-Qur'an atau Al-Sunnah, akan tetapi semata-mata hasil ijtihad ulama, Al-Quran dan Al-Sunnah tidak menjelaskan adanya calon mempelai pria dan calon mempelai wanita yang mengarah untuk dijadikan sebagai rukun pernikahan. Oleh karena itu Imam



Hanafi tidak menjadikan calon mempelai pria dan calon mempelai wanita sebagai rukun perkawinan.<sup>11</sup>

Ulama Syafi'iyah dan Imam Hambali karena itu wali dan dua orang saksi dijadikan sebagai rukun perkawinan, tetapi Imam Malik hanya menerima hadits tentang wali dan tidak menerima hadits tentang saksi, oleh karena itu Imam Malik menyatakan saksi tidak termasuk rukun perkawinan. Sedangkan Imam Hanafi menyatakan hadis tersebut kurang kuat, oleh karena itu Imam Hanafi menyatakan wali nikah dan dua orang saksi tidak dijadikan sebagai rukun perkawinan. Ulama Syafi'iyah telah menjadikan wali dan dua orang saksi sebagai rukun perkawinan serta Imam Malik menjadikan wali sebagai rukun perkawinan, oleh karena itu perlu dijelaskan pengertian wali dan dua orang saksi itu sendiri. Wali menurut bahasa artinya amat dekat atau yang melindungi, sedangkan yang dimaksud wali nikah adalah orang yang berhak untuk menikahkan seorang perempuan kepada pria pilihannya karena ada hubungan darah. Oleh karena itu orang yang tidak mempunyai hubungan darah tidak berwenang atau tidak berhak untuk menikahkan seseorang perempuan dengan pilihannya. Sebagai mana telah disepakati para ulama fiqh, urutan wali adalah dari yang paling dekat seperti ayah, kakek, saudara pria sekandung, saudara pria seapak dan seterusnya, yang kesemuanya itu dari garis keturunan pria.<sup>12</sup>

Kompilasi Hukum Islam sebagai peraturan perundangan yang menyerap aturan hukum Islam menetapkan kriteria anak sah sebagaimana yang dicantumkan

---

<sup>11</sup> Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujaahid*. (Bairut Libanon: Darul Fikri, t.th.) Juz 2.hal. 9

<sup>12</sup>*Ibid.*

dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; dan anak hasil pembuahan suami isteri yang di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, seperti yang tercantum dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Di samping itu dijelaskan juga tentang status anak dari perkawinan seorang laki-laki dengan perempuan yang dihamilinya sebelum pernikahan.

Bentuk tanggung jawab yang dijelaskan dalam hukum Islam terhimpun dalam terminologi nafkah sebagaimana termuat dalam firman Allah di awal sub bab ini. Berdasarkan ilmu ushul fiqh, kedudukan lafzah nafkah yang masih umum maka dapat dipahami bahwa perlu penjelasan tentang bagaimana kadar dan ukuran nafkah serta apa saja yang menjadi cakupan nafkah tersebut. Menurut mazhab Syafi'i, nafkah berupa makanan yang wajib diberikan suami kepada istrinya ditentukan kadarnya sejalan dengan kemampuan suami. Jumlah minimal yang harus dibayar suami sama dengan jumlah kafarat sumpah yang dibayarkan kepada seseorang, yaitu satu mudd ( 675 gram ). Imam Syafi'i menyebutkan bahwa bila keadaan suami susah ia membayar nafkah untuk istrinya satu mudd, bila kemampuan suami menengah ( sedang ) satu mudd setengah dan bila keadaan suami mampu ia harus membayar nafkah istrinya dua mudd<sup>13</sup>. Dengan demikian menurut Imam Syafi'i kadar nafkah makan untuk istri bukan berdasarkan ijtihad

---

<sup>13</sup> Al Qurthubiy, *al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Fikr, tth.), Juz III, hlm. 112



hakim atau mufti tetapi dilihat dari keadaan dan kemampuan suami<sup>14</sup>. Di samping makanan, ayat di atas juga menunjukkan ulama atas kewajiban nafkah pakaian kepada isteri berdasarkan hadis Nabi:

حَدَّثَنَا حُجَّاجُ بْنُ مِثَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مِيسَرَةَ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهَبٍ عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ أَهْدَى إِلَيَّ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حُلَّةً سَبْرَاءَ فَلَبِسْتُهَا ، فَرَأَيْتُ النَّصَبَ فِي وَجْهِهِ ، فَشَفَقْتُهَا بَيْنَ يَسَائِي<sup>15</sup>

“Dari Hujjaj bin Minhal dari Syu’bah ia berkata: Abdul Malik bin Maysarah mengabarkan ia mendengar Zaid bin Wahab dari Ali RA. Bahwa Nabi SAW menghadihkan pakaian kepadanya maka ia memakainya. Ketika itu ia melihat Nabi tidak senang maka ia memberikan pakaian itu kepada istrinya.”

Sementara pendapat yang dipegangi oleh Imam Syafi’i adalah bahwa keadaan suamilah yang menjadi dasar ukuran besar kecil nafkah istri. Apabila suami orang mampu harus memberikan dua mudd makanan ( gandum ) kepada istrinya. Suami yang tidak mampu ( orang susah ) ia memberikan satu mudd makanan kepada istrinya, dan bila suami tergolong kepada ekonomi sedang, ia harus memberikan satu setengah mudd makanan. Baik yang mampu, sedang dan tidak mampu melengkapi makanan tersebut dengan lauk – pauknya dan makanan tersebut harus dipenuhi setiap hari.<sup>16</sup>

Pendapat yang dipegangi oleh Hanafi, Maliki dan Ahmad bin Hambal<sup>17</sup> adalah apabila suami dan istri orang mampu, suami harus memberi nafkah kepada istri tingkat atas, bila keduanya dari kalangan ekonomi lemah (susah), suami harus

<sup>14</sup>Wahbah Zuhailiy, *op cit.*, hlm. 291

<sup>15</sup>Ibn Hajar, *Fath al-Bariy fi Syarh Shahih al-Bukhariy*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2000) Juz 9, hlm. 640

<sup>16</sup>Said Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid III, (Beirut: Dar al-Kutub al-Arabiyy, T.h.), hlm. 176.

<sup>17</sup>Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, (Kairo: Maktabah wa Mathba'ah al Musyhid, 1969 ), hlm. 51

memberi nafkah tingkat rendah, dan bila suami orang kaya (mampu) istri orang susah, maka suami harus memberi nafkah istri tingkat menengah, jika sebaliknya suami orang susah dan istri orang mampu, suami memberi nafkah istri menurut kemampuannya, dan kekurangannya dibayar bila keadaan ekonomi sudah baik.

Berdasarkan uraian di atas, meskipun masing-masing pendapat Imam Mazhab ataupun ulama berbeda dalam hal rukun perkawinan dan jumlah nafkah sebagaimana di atas, namun mereka sepakat dalam hal bila pernikahan tidak memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan hukum Islam, maka perkawinan tersebut tidak memiliki keabsahan dan tidak diakui status perkawinannya. Untuk itu terhadap pernikahan yang sah tersebut maka hubungan keperdataan antara ayah biologis dengan anak biologis gugur dalam seluruh aspek keperdataan, yang mencakup hubungan perwalian dalam nikah, hubungan nasab, kewajiban nafkah, kewajiban hadhanah serta hubungan kewarisan.

Dengan demikian meskipun ulama berbeda tentang kadar yang wajib tentang besarnya kewajiban nafkah namun mereka sepakat bahwa tidak ada kewajiban nafkah bagi ayah biologis terhadap anak biologis yang lahir dari nikah yang tidak sah, baik akibat dari perbuatan zina maupun anak yang tidak diakui oleh ayahnya melalui li'an.

## **2. Kedudukan Nasab Anak Dalam Hukum Islam**

Kedudukan nasab anak dalam hukum Islam didasarkan pada petunjuk al-Quran sebagai dasar utama dalam hukum Islam. Dalam al-Qur'an, kata *nasab* disebut di tiga tempat, yaitu dalam al-Furqan: 54 dan al-Shaffat: 158, masing



masing dalam bentuk *mufrad* (*nasab*) dan dalam al-Mu'minun: 101 dalam bentuk jamak (*ansab*). Secara etimologis kata *nasab* berasal dari bahasa Arab yaitu نسب yang berarti memberikan ciri-ciri dan menyebutkan keturunan.<sup>18</sup> Menurut al-Lubliyy, istilah *nasab* sudah dikenal maksudnya, yaitu jika engkau menyebut seseorang maka engkau akan mengatakan fulan bin fulan, atau menisbatkannya pada sebuah suku, negara atau pekerjaan. Sedangkan *nasab* secara terminologis, para ulama tidak merumuskan definisi. Mereka mencukupkan makna *nasab* secara umum yang digunakan pada makna etimologisnya, yaitu *alqarabah bayna syakhsain* (kekerabatan di antara dua orang) tanpa memberikan definisi terminologinya. Meskipun begitu para ahli bahasa dan mufassir memberikan penjelasan mengenai *nasab*.<sup>19</sup>

Dalam hukum Islam diaturnya salah satu tujuan penerapan hukum adalah untuk masalah, bahkan dalam mazhab maliki dikenal *masalah mursalah* sebagai salah satu *turuq istimbath al-ahkam*. Islam sebagai agama yang universal sangat memperhatikan harmonisasi kehidupan manusia, sehingga beban hukum yang dibawanya bukanlah untuk membinasakan manusia tetapi sebaliknya yaitu untuk mengantarkan manusia menuju kebahagiaan bukan hanya di akhirat semata tetapi juga di dunia. Berdasarkan kajian umum atas dalalah al-Quran dan hadis tersebut muncul prinsip umum sebagai landasan berfikir sosiologi Islam bahwa

---

<sup>18</sup> Luis Ma'luf sebagaimana dimuat dalam Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2012) hlm. 27

<sup>19</sup> Ahmad Jamaludin, *Nasab: antara hubungan darah dan hukum Serta Implikasinya terhadap kewarisan*, sebagaimana dimuat dalam jurnal Ishraqi, Vol. 10, Nomor 1, Juni 2012, hlm. 67

hukum Islam datang untuk mewujudkan kemaslahatan sebagai tujuan dari syari'at (*maqashid syar'iyah*).

Maslahat secara etimologi memiliki dua makna yang berbeda. Pertama, maslahat memiliki arti yang sama dengan *manfa'ah*, baik dalam arti maupun pemakaian lafaznya. Maslahat merupakan *isim masdar* dari *soluha*, *solaha*. Maslahat juga setara maknanya dengan *al-sulhu* dan *al-solah* yang merupakan lawan dari *al-fasad*. Maslahat secara bahasa juga bisa diartikan segala sesuatu yang membangkitkan kebaikan-kebaikan atau perbuatan-perbuatan yang diperjuangkan oleh manusia untuk menghasilkan kebaikan bagi diri dan masyarakat sekitarnya. Arti maslahat secara bahasa ini memang belum begitu bisa menggambarkan maksud maslahat dalam Islam. Hal ini karena definisi secara etimologi diambilkan dari *term* pokok yang membentuk kata "maslahat", sehingga mengakibatkan batasan yang cenderung sangat luas.<sup>20</sup>

Sedangkan definisi maslahat secara terminologi atau istilah *syara'* telah banyak dikemukakan oleh para ulama *ushul*. Di antaranya Imam Ghazali, memberikan definisi maslahat sebagai berikut:<sup>21</sup>

المصلحة هي عبارة في الصل عن جلب منفعة او دفع مضرة

"Maslahat adalah sebuah ungkapan yang menunjukkan adanya (usaha) mengambil manfaat dan menolak mudarat."

<sup>20</sup> Louis Ma'luf, *al-Munjid*, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), hlm. 432

<sup>21</sup> Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustasfa*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993), hlm. 176.



Muhammad Sa'id Ramadan al-Buti mendefinisikan maslahat secara lebih spesifik yakni manfaat yang dikehendaki oleh Pembuat Hukum (Allah) yang Maha Bijaksana untuk hamba-Nya, berupa menjaga agama, jiwa, akal, nasab, dan harta mereka, berdasarkan urutan tertentu yang ada di antara manfaat-manfaat tersebut.<sup>22</sup>

Dengan demikian dapat dipahami bahwa kedudukan nasab dalam hukum Islam adalah *hifzun nasl*, yakni terpeliharanya kesucian keturunan manusia sebagai pemegang amanah khalifah di muka bumi. Hubungan darah (nasab) antara orang tua dan anak merupakan hubungan keperdataan yang paling kuat dan tidak dapat diganggu gugat oleh hubungan lain dari manapun.

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri atau suami isteri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.<sup>23</sup>

Dalam bahasa al-Quran anak sering diungkapkan dengan kata *al-walad*. Kata *al-walad* dipakai untuk menggambarkan adanya hubungan keturunan, sehingga kata *al-walid* dan *al-walidah* diartikan sebagai ayah dan ibu kandung. Berbeda dengan kata *ibn* yang tidak mesti menunjukkan hubungan keturunan dan kata *ab* tidak mesti berarti ayah kandung.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Muhammad Sa'id Ramadan al-Buthi, *Dawabith al-Mashlahah fi al-Syari'ah al-Islamiyah* (Damaskus: al-Umawiyah, 1967) hlm. 23.

<sup>23</sup> Pasal 1 (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak.

<sup>24</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, jilid XV (Jakarta, Lentera Hati, 2004), hlm. 614.

Anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai keturunan, anak juga mengandung pengertian sebagai manusia yang masih kecil. Selain itu, anak pada hakekatnya seorang yang berada pada satu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa.<sup>25</sup> Dengan demikian hubungan darah nasab anak sangat penting dalam kaitannya dengan orang yang menurunkannya. Al-Qur'an melarang memutuskan penisbatan (*nasab*) seseorang dari ayah kandungnya. Karena itulah Islam melarang adopsi bila berakibat memutuskan nasab anak tersebut dari orangtua kandungnya dan sebaliknya menasabkannya kepada orangtua angkatnya. Islam sangat menekankan pentingnya *nasab*, khususnya nasab dengan ayah, karena dengan diketahuinya nasab seseorang maka dapat dikenali siapa orangtuanya dan saudara/ kerabatnya. Untuk itu dalam hukum Islam adopsi hanya dibolehkan dengan syarat tidak menghilangkan jejak garis keturunan dengan ayah biologisnya.<sup>26</sup>

Terkait dengan hubungan nasab dengan perkawinan, bilamana dalam suatu perkawinan yang sah, maka nasab anak akan dihubungkan kepada ayah dan ibunya. Status anak yang dilahirkan di luar perkawinan dalam Islam hanya memiliki hubungan dengan ibu dan keluarga ibunya sebagai hubungan yang tidak bisa disangkal bersifat alamiah. Di dalam Islam yang dihubungkan nasabnya kepada ayah hanyalah anak yang dilahirkan sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Ketentuan seperti ini pada dasarnya bukan untuk menghukum sang anak tapi untuk memperkuat efek jera kepada ayah dan ibu yang melakukan hubungan di

---

<sup>25</sup> Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (cet-2; Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hlm. 30-1.

<sup>26</sup> Ahmad Jamaludin, *op.cit.*, hlm. 68



luar ikatan perkawinan yang sah. Dengan demikian jelas bahwa anak yang dilahirkan diluar ikatan perkawinan yang sah tidak dapat dihubungkan kepada ayah biologisnya, tetapi hanya pada ibu dan keluarga ibunya saja. Pendapat inilah yang dipegang oleh jumhur ulama mazhab dalam hukum Islam.

Nasab di dalam hukum Islam merupakan persoalan penting Islam karena menjadi tautan dari sejumlah hukum *wad'iy*, yaitu sebagai sebab (*al-sabab*) adanya kewajiban seseorang untuk menafkahi dan mendidik anaknya, sebab seseorang untuk menghormati, membantu dan jika diperlukan menafkahi orangtuanya, sebab adanya kewajiban seseorang untuk membantu kerabatnya (*ulu al-qurba/dzu al-qurba*), sebab adanya hak/kewajiban perwalian, baik perwalian atas harta maupun perwalian atas diri (seperti perwalian nikah), sebab hubungan kewarisan, dan juga sebagai halangan-halangan (*al-mani* ' ) menikah.<sup>27</sup>

Dengan demikian dapat dilihat bahwa hubungan nasab dalam hukum Islam berimplikasi setidaknya pada beberapa aspek hukum, yakni kewajiban nafkah, perwalian, kewarisan dan larangan pernikahan. Dalam hal kewajiban nafkah, kewajiban ayah menafkahi anak selama anak kandungnya dalam keadaan membutuhkan nafkah. Seorang ayah yang mampu akan tetapi tidak memberi nafkah kepada anaknya padahal anaknya sedang membutuhkan, dapat dipaksa oleh hakim atau dipenjarakan sampai ia bersedia menunaikan kewajibannya. Seorang ayah yang menunggak nafkah anaknya tetapi ternyata anaknya tidak sedang membutuhkan nafkah dari ayahnya maka hak nafkahnya gugur, karena si anak dalam memenuhi kebutuhan selama ayahnya menunggak tidak sampai

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

berhutang karena ia mampu membiayai diri sendiri, akan tetapi jika anak tidak mempunyai dana sendiri sehingga untuk memenuhi kebutuhannya ia harus berhutang maka si ayah dianggap berhutang nafkah yang belum dibayarkan kepada anaknya.<sup>28</sup>

Di samping itu hukum nasab terkait erat dengan larangan pernikahan dimana disyaratkan bagi wanita yang akan dinikahi oleh seorang laki-laki untuk tidak termasuk dari dia yang diharamkan atasnya. Wanita yang diharamkan adalah:<sup>29</sup>

1. Diharamkan berdasarkan nasab, mereka adalah: ibu dan keatasnya, putri dan kebawahnya, saudari, saudari ayah, saudari ibu, putrinya saudara dan putrinya saudari.
2. Diharamkan berdasarkan susuan, apa yang diharamkan berdasarkan susuan sama dengan apa yang diharamkan berdasarkan nasab, setiap wanita yang haram berdasarkan nasab maka diapun sama hukumnya dengan apa yang ada pada susuan, kecuali ibu saudara dan saudari anak dari satu susuannya, keduanya tidak haram baginya. Susuan yang diharamkan: lima kali susuan atau lebih ketika masih bayi dibawah umur dua tahun.
3. Diharamkan berdasarkan mushoharoh, mereka adalah: ibunya isteri (mertua), putrinya isteri dari suami lain jika dia telah berhubungan dengan ibunya, isterinya ayah dan isterinya putra. Wanita yang diharamkan berdasarkan nasab

---

<sup>28</sup>Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (cet-2, Kencana, Jakarta, 2004), hlm. 157-63.

<sup>29</sup>Said Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Daarul Fikri: Beirut, 1990) hlm. 61-66



ada tujuh, berdasarkan susuan sama dengannya berjumlah tujuh dan dari mushoharoh ada empat. Allah berfirman:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَابِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّائِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَابِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu) dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" (An-Nisaa: 23)

Terkait juga dengan hukum pernikahan dan hubungannya dengan nasab adalah keberadaan wali nasab bagi seorang wanita yang akan menikah. Dalam hukum Islam diwajibkan bagi seorang wanita yang telah dewasa untuk meminta idzin kepada wali sebelum dia dinikahkan, baik itu perawan ataupun janda, dan tidak boleh memaksanya untuk menikahkannya dengan laki-laki yang dia benci, jika dia dinikahkan dalam keadaan tidak meridhoinya, maka dia berhak untuk memutuskan hubungan pernikahan tersebut. Dalilnya adalah hadis dari Abu Hurairah r.a: bahwasanya Nabi SAW bersabda:

" لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن " قالوا: يا رسول الله وكيف إذلهما؟ قال: " أن تسكت " متفق عليه

"Seorang janda tidak boleh dinikahkan sampai dia dimintai pendapat, demikian pula dengan seorang perawan sampai dia dimintai idzin" para sahabat bertanya: wahai Rasulullah, bagaimanakah tanda setujunya? Beliau menjawab: "dengan cara berdiam diri". Muttafaq Alaihi.







klasik cucu dari anak perempuan tidak berhak memperoleh warisan, sementara cucu dari anak laki-laki berhak memperoleh warisan. Namun dalam pemikiran fiqh syi'ah, berlaku *al-nasab li al-abawayndimana* kedua cucu itu sama-sama berhak memperoleh warisan. Begitu pula dalam hal kakek, nenek, paman, bibi.<sup>31</sup>

Perkawinan menurut syari'at Islam bertujuan untuk membuat hubungan antara laki-laki dan perempuan menjadi terhormat dan saling meridhai, memberikan jalan yang paling sentosa pada sex sebagai naluri manusia, memelihara keturunan dengan baik dan menghindarkan kaum wanita dari penindasan kaum laki-laki, membuat pergaulan suami-isteri berada dalam naungan naluri keibuan dan kebakakan, sehingga akan melahirkan anak keturunan yang baik sebagai generasi penerus misi kekhalifahan serta menimbulkan suasana yang tertib dan aman dalam kehidupan sosial.<sup>32</sup> Untuk mencapai tujuan perkawinan tersebut, penetapan nasab menjadi penting dalam hukum Islam. Pada dasarnya penetapan nasab didasarkan pada keabsahan perkawinan. Dalam menetapkan nasab, menurut fuqaha', nasab seseorang kepada ayahnya disebabkan oleh salah satu dari tiga hal:

#### 1. Nikah Sahih

Para fuqaha' sepakat bahwa seorang anak yang lahir dari seorang wanita dalam suatu pernikahan yang sah dinasabkan kepada suami wanita tersebut. Hal ini didasarkan pada Hadis Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw. bersabda: *Anak itu dinasabkan kepada yang memiliki tempat tidur (laki-laki yang menikahi*

<sup>31</sup> Ahmad Jamaludin, *op.cit.*, hlm. 81

<sup>32</sup> H. M. Zuffran Sabrie, *Analisa Hukum Islam Tentang Anak Luar Nikah*. (Jakarta : Departemen Agama RI, 1998), hlm. 7-8.

ibunya), dan bagi yang melakukan perzinaan (*hukuman*) batu(*rajam*). Anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah dinasabkan kepada suami wanita yang melahirkannya dengan syarat:<sup>33</sup>

- a. Anak itu dilahirkan minimal enam bulan setelah pernikahan kedua orangtuanya. Jika anak tersebut lahir kurang dari enam bulan maka tidak dapat dinasabkan kepada suami ibunya, kecuali jika suami mendakunya. Pendakuan itu dibenarkan dengan anggapan bahwa anak itu buah dari akad nikah sebelumnya (misalnya nikah sirri), atau nikah fasid maupun senggama syubhat, dengan tujuan untuk kemaslahatan anak atau menjaga nama baik.
- b. Laki-laki yang menjadi suami wanita tersebut haruslah orang yang memungkinkan memberikan keturunan. Anak yang dilahirkan oleh seorang wanita dengan suami yang masih kecil yang menurut kebiasaan belum bisa memberikan keturunan atau yang tidak bisa melakukan senggama tidak bisa dinasabkan kepada suaminya, meskipun anak itu lahir setelah enam bulan dari perkawinan.
- c. Adanya kemungkinan suami istri itu bertemu setelah akad. Menurut Hanafiyah, kemungkinan itu bisa secara *taqdiri* saja. Seandainya seorang suami tinggal di Barat dan istri tinggal di Timur, lalu istri melahirkan anak maka anak itu tetap dinasabkan kepada suami, karena ada orang yang memiliki karomah sehingga dapat menempuh perjalanan singkat tanpa diketahui orang lain. Sementara menurut mayoritas ulama, kemungkinan itu harus secara nyata atau menurut kebiasaan.

---

<sup>33</sup> Ahmad Jamaludin, *op.cit.*, hlm. 70



- d. Si suami tidak mengingkari. Jika suami mengingkari dengan pengingkaran yang dapat diterima maka dia harus mengucapkan li'an. Pengingkaran yang dapat diterima adalah pengingkaran oleh suami yang sebelumnya belum mengakui atau belum ada indikasi mengakui anak tersebut. Kalau dia sudah mengakui atau menunjukkan indikasi mengakui, seperti mempersiapkan kelahiran anak itu atau mau menerima ucapan selamat atas kelahiran anak tersebut, maka pengingkarannya tidak dapat diterima.
- e. Apabila anak lahir setelah terjadinya perceraian antara suami istri, fuqaha' sepakat menyatakan bahwa apabila seorang suami mentalak istrinya setelah melakukan hubungan seksual dan kemudian anak lahir kurang dari enam bulan setelah terjadinya perceraian maka anak tersebut bernasab kepada suami wanita itu. Akan tetapi bila kelahiran lebih dari enam bulan sejak terjadinya perceraian sedangkan suami tidak melakukan hubungan seksual sebelum cerai maka anak tersebut tidak bisa dinasabkan kepada suaminya. Apabila suami menceraikan istrinya setelah melakukan hubungan, baik cerai tersebut melalui talak raj'i maupun talak ba'in, atau karena kematian suami, maka terdapat dua kemungkinan. Pertama, apabila anak tersebut lahir sebelum habisnya masa maksimal kehamilan setelah perceraian atau kematian suami, maka nasabnya dihubungkan kepada suaminya. Kedua, apabila anak lahir melebihi waktu maksimal kehamilan (yang diperhitungkan sejak terjadinya perceraian atau kematian suami) menurut jumhur ulama maka anak itu tidak bisa dinasabkan kepada suami wanita tersebut.

## 2. Pernikahan fasid

Pernikahan fasid adalah pernikahan yang tidak memenuhi rukun dan syarat nikah, seperti walinya bukan orang yang berhak menjadi wali nikah atau mempelai perempuan masih dalam masa 'iddah. Anak yang dilahirkan sebagai akibat dari nikah fasid nasabnya sama dengan yang dilahirkan sebagai akibat dari nikah sah. Ditetapkannya hubungan nasab ini dimaksudkan untuk menjaga kepentingan anak. Hanya saja, berbeda dengan nikah sah, yang menjadi sebab hubungan nasab dalam nikah fasid bukanlah akad itu sendiri, melainkan hubungan seksual yang dilakukan dalam ikatan nikah fasid. Karena itu, di samping syarat-syarat sebagaimana yang berlaku dalam nikah sah, untuk timbulnya hubungan nasab juga dipersyaratkan telah terjadinya senggama di antara ayah ibunya atau, menurut Malikiyah, keduanya sudah melakukan khalwat.<sup>34</sup>

## 3. Senggama syubhat

Senggama syubhat adalah hubungan seksual bukan zina tetapi tidak dalam pernikahan yang sah maupun fasid. Misalnya, dalam pernikahan di mana mempelai pria tidak melihat mempelai wanita. Kemudian diantarkanlah seorang wanita ke rumah pria tersebut dan dikatakan bahwa wanita itu adalah istrinya, kemudian dikumpulinya. Ternyata kemudian diketahui bahwa wanita itu bukanlah istrinya. Jika kemudian wanita itu melahirkan anak setelah enam bulan dari senggama syubhat tersebut maka anak itu mempunyai hubungan nasab dengan

---

<sup>34</sup>Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwal al-Syakshiyah*. (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabiyy, 2005), hlm. 389-390.



pria tersebut. Jika melahirkan kurang dari enam bulan maka tidak bisa dinasabkan kepadanya, kecuali jika si pria mendakunya.<sup>35</sup>

Untuk mendapatkan status hukum nasab, ada beberapa upaya hukum yang dapat dilakukan, antara lain:

a. *Iqrar* (Pendakuan) atau *Istilhaq* (Penghubungan).

Jika seorang anak tidak diketahui siapa ayahnya atau juga ibunya, maka penetapan nasabnya dapat dilakukan dengan cara *iqrar* atau *istilhaq*, yaitu pendakuan tentang adanya hubungan nasab seseorang dengan pendaku, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Pendakuan secara langsung adalah mendaku orang lain sebagai anaknya atau ayahnya. Sedangkan pendakuan secara tidak langsung misalnya mendaku orang lain sebagai saudaranya atau cucunya atau pamannya atau kakeknya.

Pendakuan secara langsung dipandang sah jika memenuhi empat syarat sebagaimana yang disepakati kebanyakan fuqaha', yaitu orang yang didaku memang tidak diketahui nasabnya; dari sisi umur antara si pendaku dengan yang didaku pantas sebagai ayah dan anak atau anak dan ayah; serta orang yang didaku membenarkan pendakuan tersebut, jika dia sudah memiliki kecakapan hukum. Disamping itu, orang yang mendaku tidak menyatakan bahwa orang yang didaku adalah anaknya sebagai hasil zina.

Sedangkan pendakuan secara tidak langsung, di samping harus memenuhi syarat-syarat tersebut, juga harus memenuhi satu syarat tambahan, yaitu bahwa

---

<sup>35</sup> Ahmad Jamaludin, *op.cit.*, hlm. 71

pendakuan itu dibenarkan oleh orang lain yang secara langsung mempunyai hubungan nasab akibat pendakuan tidak langsung tersebut. Misalnya, kalau A mendaku bahwa C adalah cucunya dari B yang merupakan anaknya, maka untuk sahnya pendakuan tersebut diperlukan pembenaran dari si B.<sup>36</sup>

#### b. Pembuktian dengan kesaksian

Menurut fuqaha', nasab juga dapat ditetapkan berdasarkan kesaksian. Saksi tersebut harus dua orang laki-laki menurut Malikiyyah, tetapi bisa satu orang laki-laki dan dua orang perempuan menurut Abu Hanifah dan Muhammad. Sementara Syafi'iyah, Hanabilah dan Abu Yusuf memberikan hak kesaksian itu kepada semua ahli waris. Pengakuan nasab dengan kesaksian ini menurut fuqaha' lebih kuat daripada sekedar pendakuan.

Dalam hal saksi sebagai alat pembuktian, yang diperlukan dalam proses pemeriksaan di pengadilan untuk memperjelas suatu peristiwa dan kejadian yang dipersengketakan oleh para pihak yang berperkara, dan bukan masalah yang berhubungan dengan agama seperti dua orang saksi beragama Islam adalah syarat hukum untuk syahnya perkawinan, maka kesaksian non-muslim dapat diterima.

- a. Tidak buta
- b. Tidak bisu
- c. Adil
- d. Netral (tidak ada kepentingan)<sup>37</sup>

<sup>36</sup> Ahmad Jamaludin, *op. cit.*, hlm. 71

<sup>37</sup> Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Edisi Baru (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 160-4.



Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya nasab didasarkan pada adanya hubungan darah (biologis). Pernikahan (baik sah maupun fasid) tidak serta merta membuat anak yang dilahirkan seorang wanita mempunyai hubungan nasab dengan suami si wanita tersebut. Diperlukan persyaratan untuk memastikan bahwa anak tersebut adalah darah daging suami ibunya.

## **B. STATUS ANAK LUAR KAWIN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF**

Dalam hukum Perdata terdapat pengelompokan anak dalam dua bagian yaitu anak sah dan anak di luar pernikahan. Anak sah adalah anak yang dianggap lahir dari pernikahan yang sah antara ayah dan ibunya. Anak yang lahir di luar pernikahan dapat diakui oleh ayah dan ibunya. Melalui pengakuan anak, anak di luar pernikahan memperoleh pertalian dengan orang yang mengakuinya, tapi terbatas dengan yang mengakuinya saja. Pertalian dengan keluarga ayah dan ibunya baru terjawab melalui pengesahan anak yang mengharuskan mereka

berdua nikah secara sah. Hanya saja Hukum Perdata tidak mengenal pengakuan terhadap anak hasil zina.<sup>38</sup>

Secara lebih rinci, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyebutkan beberapa pengelompokan anak sebagai berikut:<sup>39</sup>

- a. Anak Sah (Pasal 250) : “anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan memperoleh si suami sebagai ayahnya”
- b. Anak Zina (Pasal 284): “seorang pria yang setelah kawin melakukan mukah (overspel) padahal diketahuinya bahwa pasal 27 KUHPerdata berlaku baginya dan seorang wanita yang telah kawin melakukan mukah (overspel) padahal diketahuinya bahwa pasal 27 KUHPerdata berlaku baginya.
- c. Anak Sumbang (Pasal 30):” perkawinan dilarang di antara mereka yang satu sama lainnya mempunyai hubungan darah dalam garis keatas dan maupun garis ke bawah baik karena kelahiran yang sah maupun kelahiran yang tidak sah atau karena perkawinan dalam garis ke samping antara kakak beradik laki perempuan sah atau tidak sah.

Disamping tiga kelompok di atas, peraturan perundangan lainnya yang menyebut tentang pengelompokan anak adalah PP nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengakatan Anak pasal 1 yang menyebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orangtua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan orang tua angkatnya

---

<sup>38</sup> R. Soebekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Cet. XVII; Jakarta: Intermasa, 1987), hlm. 48.

<sup>39</sup> DY. Witanto, *Hukum Keluarga; Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materil UU Perkawinan* (Jakarta: 2012, Prestasi Pustaka) hlm. 37-45



berdasarkan keputusan dan ketetapan pengadilan.<sup>40</sup> Dengan demikian apabila anak tersebut diangkat anak oleh orang lain, maka kewajiban nafkah akan beralih kepada ayah angkatnya, walaupun pada dasarnya pokok kewajiban itu dibebankan kepada orang yang terkait dengan hubungan nasab.

Dalam KUH Perdata Pasal 326 diatur tentang tanggung jawab ayah biologis terhadap nafkah yang menyatakan bahwa *"apabila pihak yang berwajib memberi nafkah membuktikan ketidakmampuannya menyediakan uang untuk keperluan itu, maka pengadilan negeri adalah berkuasa, setelah menyelidiki duduk perkara, memerintahkan kepadanya supaya menempatkan pihak yang membutuhkan nafkah dalam rumahnya dan memberikan kepadanya barang seperlunya"*.

Dari Pasal 326 pada kalimat memerintahkan kepadanya dalam hal ini sang anak supaya menempatkan pihak yang membutuhkan nafkah dalam hal ini orang tua kedalam rumahnya sang anak dan memberikan barang seperlunya. Kewajiban pemberian nafkah ini dipandang oleh undang-undang demi ketertiban umum dan tidak dapat dihapus dengan suatu perjanjian (Pasal 329 BW). Semua perjanjian yang menyatakan salah satu pihak melepaskan haknya untuk mendapatkan nafkah dianggap batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum (Pasal 329 BW). Suatu syarat mutlak untuk kewajiban alimentatie ini adalah bahwa yang berhak harus betul-betul memerlukan, artinya: ia tidak mampu dengan bekerja mencukupi kebutuhan hutangnya.

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 48

Kewajiban untuk memberikan nafkah itu lazimnya berupa uang. Akan tetapi dalam Pasal 326 BW diadakan pengecualian yang menyatakan: jika orang yang wajib memberikan nafkah itu tidak mungkin memberikan sejumlah uang, maka pengadilan negeri dapat memutuskan supaya orang yang harus disokong itu hidup serumah dengan dia. Dengan demikian dalam putusan MK tersebut dipandang sebagai suatu ketidakadilan jika seorang laki-laki yang telah melakukan suatu hubungan dengan seorang perempuan terlepas dari tanggung jawab. Apalagi selama ini anak yang di lahirkan di luar perkawinan mendapat stigma yang tidak baik di tengah masyarakat. Seorang anak yang seperti itu mesti mendapat perlindungan hukum dari Negara walaupun status perkawinan orang tuanya masih dipersengketakan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa bunyi pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 harus diubah dengan norma hukum dimana anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya.

Persoalan kedua dalam diktum putusan MK tersebut adalah adanya hubungan keperdataan antara anak dan ayah biologis tersebut didasarkan pada pembuktian yang dapat diterima secara ilmiah. Dengan demikian norma hukum tentang penetapan hubungan keperdataan berdasarkan diktum putusan MK di atas juga tidak terjadi secara otomatis, namun membutuhkan pembuktian berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga



ayahnya. Pada masa modern seperti sekarang, selain dengan kesaksian, pembuktian nasab tentunya bisa dilakukan dengan tes DNA (*deoxyribo nucleic acid*). Namun, meskipun tes DNA bukan hal baru dalam penyidikan kepolisian dan pembuktian di pengadilan, para ulama masih berbeda pendapat antara yang memperbolehkan dan yang tidak memperbolehkan. Hal ini salah satunya adalah penggunaan peralatan modern berupa kecanggihan teknologi untuk membuktikan tindak perzinahan. Islam tidak menafikan kepentingan penemuan dan peranan Sains kepada kemaslahatan umum umat manusia.

Penggunaan teknologi DNA dalam menentukan apakah anak yang dikandung seorang istri adalah anak dari suaminya atau dari laki-laki lain. Hal ini akan menjadi bukti yang kuat seorang isteri yang berzina karena tidak mungkin ia mengalami kehamilan kecuali dengan hubungan biologis suami isteri sebelumnya. Dengan demikian untuk menetapkan hubungan keperdataan seorang ayah dengan anak biologisnya dibutuhkan keputusan pengadilan dalam kekuasaan kehakiman, dalam hal ini bisa jadi Pengadilan Negeri ataupun Pengadilan Agama berdasarkan pembuktian yang dapat diterima di depan hukum. Setelah adanya penetapan hukum tersebut barulah hubungan keperdataan antara ayah dan anak biologis luar nikah dapat diakui secara hukum.

Untuk mencapai tingkat kesempurnaan sebuah aturan hukum maka hukum harus bersentuhan dengan bidang-bidang ilmu lain terutama dalam pembuktian agar persoalan hukum yang terjadi dapat lebih jelas. Dalam dunia ilmu pengetahuan forensik, tes DNA memungkinkan seseorang dapat diketahui memiliki kekerabatan dengan siapa. Tes DNA dilakukan dengan mengambil

*mitokondria* seseorang untuk dibandingkan dengan *mitokondria* yang dimiliki kerabatnya. Seorang ayah akan mewariskan kromosom Y kepada anak laki-lakinya serta mewariskan kromosom X kepada anak perempuannya.<sup>41</sup>

Hukum pembuktian dalam suatu peristiwa perkawinan adalah ketentuan hukum yang berfungsi untuk menegakan hukum materil tentang perkawinan itu, ketika terjadi persengketaan, keraguan adanya perkawinan atau hal-hal lain yang memerlukan bukti perkawinan. Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap prosedur dan administrasi tidak berakibat substansi perkawinannya menjadi tidak sah, dan demikian pula akibat hukum terhadap anak yang dilahirkannya tidak dapat dikategorikan sebagai anak tidak sah atau anak di luar perkawinan.

Oleh karena itu pemecahan masalah agar anak yang dilahirkan dari perkawinan yang demikian agar mendapatkan status hukum dapat ditempuh sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan "bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat". Bukti-bukti dalam hal ini harus dikembalikan kepada asas umum pembuktian sesuai Pasal 284 Rbg dan 164 HIR untuk membuktikan adanya perkawinan yang sah ditambah bukti lain berupa bukti hasil pemeriksaan tes DNA untuk membuktikan bahwa anak tersebut benar-benar dilahirkan dari suami istri itu. Solusi ini juga sebenarnya mengandung konsekwensi apabila seorang anak dinyatakan sebagai anak sah dari hasil perkawinan poligami di bawah tangan

---

<sup>41</sup> DY, Wilitanto, *op.cit.*, hlm. 233-234



tersebut, walaupun tidak dinyatakan secara tegas, akan berakibat secara tersirat pengadilan telah mengakui adanya perkawinan yang menurut undang-undang terdapat halangan.

### **C. Pergeseran Hukum tentang Keabsahan Status Hukum Pernikahan Sebagai Landasan Hukum Ayah Dan Anak Biologis akibat Putusan MK dan Implikasi Hukumnya**

#### **1. Keabsahan Status Hukum Pernikahan Sebagai Landasan Hukum Ayah biologis Dan Anak luar nikah dalam perspektif Hukum Islam**

Perkawinan atau nikah dalam hukum Islam diartikan sebagai ikatan yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan merupakan muhrim.<sup>42</sup> Perkawinan merupakan salah satu hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT demi kemaslahatan seluruh umat manusia, guna menyalurkan kodrat manusia dalam menyalurkan nafsu birahi secara benar dan pemeliharaan keturunan yang dilahirkannya, disamping mewujudkan suasana rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan ramah, sebagaimana yang dikandung dalam Q.S. al-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

<sup>42</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Jakarta : Attahiriyah, 1993), Hal. 355



*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (Qs. Ar-Rum (30) : 21)<sup>43</sup>*

Tujuan perkawinan menurut Islam adalah menuruti perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.<sup>44</sup> Untuk mencapai tujuan perkawinan tersebut maka diatur berbagai norma hukum perkawinan terutama terkait dengan syarat sahnya pernikahan sebagai asas keabsahan perkawinan. Dalam budaya hukum di Indonesia, masyarakat muslim pada umumnya meyakini bahwa rukun perkawinan terhimpun dalam lima perkara yakni adanya calon mempelai suami dan istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab kabul.<sup>45</sup> Di samping itu dalam positivisasi hukum Islam Indonesia<sup>46</sup> merinci syarat perkawinan sebagai mana

---

<sup>43</sup> Tim penyusunan Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: DEPAG RI, 1990)

<sup>44</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 12-18.

<sup>45</sup> Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: 2001. Tidak disebutkannya mahar dalam hal ini dikarenakan pada umumnya mazhab fiqh membolehkan mahar secara tidak tunai artinya dapat diserahkan setelah ijab kabul.

<sup>46</sup> Pasca kemerdekaan Indonesia, antara hukum Islam, hukum Barat dan hukum adat sama-sama menjadi bahan bagi pembangunan hukum nasional yang menghendaki adanya unifikasi. Hukum Islam dan hukum Adat untuk bisa berlaku dalam sebuah negara terlebih dahulu harus melalui positivisasi, yakni memasukkan prinsip-prinsip hukum (Islam maupun adat) ke dalam peraturan perundang-undangan. Lihat Abdul Ghofur Anshori dan Yulkarnain Harahab, *Hukum Islam Dinamika Dan Perkembangannya Di Indonesia*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008), h. 6. Positivisasi menurut A. Qodri Azizy jika ditinjau dari aspek akademik tetap melalui proses keilmuan dalam disiplin ilmu hukum (*jurisprudence*), dan tetap dalam koridor demokratisasi jika ditinjau dari segi sistem politik yang demokratis. Tentu ada strategi dan pendekatan yang lain yang biasanya dilaksanakan oleh pemerintah di negara yang mengklaim sebagai negara yang menjalankan syari'at Islam yaitu dengan menggunakan logika dan dasar bahwa setiap orang Islam harus menjalankan syariat Islam. Lihat A. Qodri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional (Kompetisi Antara Hukum Islam Dan Hukum Umum)*, (Yogyakarta: Gama Media Offset, 2004), h. 173



tercantum dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 adalah sebagai berikut:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan ke dua calon mempelai,
2. Ke dua mempelai mencapai umur 21 tahun, jika kurang dari umur 21 tahun harus mendapat izin dari ke dua orang tua, jika wanita kurang dari umur 16 tahun dan pria kurang dari umur 19 tahun, maka harus mendapat izin dari Pengadilan (dispensasi kawin),
3. Tidak ada larangan menurut hukum Islam.

Adanya aturan tambahan sebagai bentuk positivisasi hukum Islam di Indonesia tersebut berimplikasi pada norma hukum tentang pencatatan perkawinan sebagai syarat legitimasi absah atau tidaknya suatu perkawinan. Berkaitan dengan pencatatan perkawinan, pada awalnya hukum Islam tidak secara konkret mengaturnya. Melalui hadis Rasulullah SAW perkawinan disyaratkan diketahui masyarakat, diumumkan kepada khalayak luas melalui *walimatul-'ursy*:

أَغْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْغُرْبَالِ (رواه ابن ماجه عن عائشة<sup>47</sup>)

Artinya: Umumkanlah pernikahan dan pukullah rebana.

Perintah Nabi Muhammad SAW agar mengumumkan atau mengiklankan nikah meskipun dengan memotong seekor kambing dalam masyarakat kesukuan yang kecil dan tertutup seperti di Hijaz dahulu, dengan pesta memotong hewan memang sudah cukup sebagai pengumuman resmi. Akan tetapi dalam masyarakat yang kompleks dan penuh dengan formalitas seperti zaman sekarang ini, pesta dengan memotong seekor kambing saja tidak cukup melainkan

---

<sup>47</sup> HR. Ibn Majah dari Aisyah

harus didokumentasikan secara resmi pada kantor yang bertugas mengurus hal itu.<sup>48</sup>

Dengan demikian perubahan dan tuntutan zaman dan dengan pertimbangan kemaslahatan, menuntut pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, apabila terjadi perselisihan di antara suami isteri, atau salah satu pihak tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh haknya masing-masing, karena dengan akta nikah suami isteri memiliki bukti otentik atas perkawinan yang terjadi antara mereka.

Tanggungjawab ayah biologis terhadap anak dalam perspektif hukum Islam terkait dengan persoalan utama yakni persoalan nafkah. Kata nafkah berasal dari bahasa arab ( نفق - ينفق - نفقا ) yang berarti membelanjakan<sup>49</sup>. Ibn Arabiy menjelaskan bahwa kata نفق memiliki banyak makna di antaranya zakat wajib, nafkah suami pada ahli keluarganya, shadaqah sunnah, serta memenuhi hak-hak yang wajib selain zakat. Pengertian nafkah dengan arti shadaqah baik sunnah maupun wajib dinaskh dengan ayat-ayat zakat sehingga pengertian yang paling tepat adalah dengan makna *al-itlaaf* (menghabiskan).<sup>50</sup> Semua pengertian nafkah yang diungkap Ibn Arabiy di atas pada dasarnya merupakan pemahaman yang digali dari lafazh yang digunakan dalam al-Quran.

---

<sup>48</sup> M. Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998) hal. 180-181

<sup>49</sup> Muhammad Idris Al Marbawy., *Kamus Marbawy.*, (Kairo: Mustafa al-Baby al-Haby, 1350 H), hlm. 336.

<sup>50</sup> Ibn Arabiy, *Ahkam al-Quran*, jilid I, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.) hlm. 18



Berdasarkan definisi di atas dapat dipahami bahwa nafkah dalam artian sempit mencakup tanggungjawab suami terhadap keluarganya. Salah satu ayat al-Quran yang dapat dijadikan rujukan dalam menjelaskan kewajiban nafkah terhadap anak adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 233 berikut:

• وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِيَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْعَرَفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعُهَا لَا تُضَارُّ وَلَدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَزِضُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْعَرَفِ وَأَنْتُمْ وَاللَّهُ وَالْعَلَمُونَ بَا

تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿٢٣٣﴾

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Dalam memahami ayat di atas al-Jashash mengutip riwayat dari Umar, Zaid bin Tsabit, Hasan dan Qubaidhah bahwa yang dimaksud dengan *وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ* adalah nafkah.<sup>51</sup> Wahbah zuhailiy menjelaskan bahwa ayat Al Quran diatas tidak menyebutkan secara tegas, rumah menjadi kewajiban suami menyediakannya sebagaimana makan dan pakaian<sup>52</sup>. Namun karena rumah merupakan kebutuhan pokok yang mesti ada dalam kehidupan, maka suami wajib menyediakannya sejajar / sama dengan keperluan makan dan pakaian. Ulama fiqh

<sup>51</sup> AL-Jashshash, *Ahkam al-Quran*, jilid I, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993) hlm. 554

<sup>52</sup> Wahbah Zuhailiy, *Tafsir al Munir*, op.cit., hlm. 285



berbeda dalam menetapkan kadar besar – kecilnya nafkah istri yang harus dibayar suami, dan apakah keadaan istri juga menjadi pertimbangan dalam menetapkan nafkah.

Ungkapan kata *bi al-ma'ruf* ( بالمعروف ) pada kedua ayat diatas mengisyaratkan bahwa kadar / ukuran besar – kecil nafkah istri disesuaikan dengan keadaan suami dan istri<sup>53</sup>. Jumhur ulama, selain mazhab Syafi'i menetapkan bahwa nafkah istri itu diberikan secukup dan sepantasnya. Mereka tidak menetapkan jumlah besarnya nafkah, tetapi hanya disesuaikan kemampuan suami.<sup>54</sup> Hal yang sama diungkapkan pula oleh Wahbah Zuhaili, bahwa nafkah yang diberikan suami kepada istri didasarkan kepada keadaan dan kemampuan suami<sup>55</sup>.

Kewajiban memberi nafkah yang dibebankan kepada suami semakin dipertegas oleh pengaduan Hindun Binti Utaibah atas keengganan suaminya Abu sufyan memberi nafkah untuk dirinya dan anak mereka dalam hadis Nabi :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : { دَخَلْتُ هِنْدُ بِنْتُ عُثْبَةَ - امْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ - عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ النِّفْقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ ، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ ؟ فَقَالَ : خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَمَا يَكْفِي بَنِيكَ }<sup>56</sup>

"Dari Aisyah RA: Hindun binti Utbah , istri Abu Sufyan, masuk ke rumah Rasul SAW dan berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan seorang lelaki yang pelit dan

<sup>53</sup> Ash-Shan'any., *Subulussalam*., jilid III, ( Bandung: Maktabah al-Dakhlan, , tth) , hlm. 221

<sup>54</sup> Abu Ja'far Muhammad Jarir at Thabary, *Tafsir at-Thabary*, juz 1, (Beirut: Dar al-Ilmi, 1420 H), hlm. 509

<sup>55</sup> Wahbah Zuhaili, *loc. cit.*

<sup>56</sup> *Ibid.* hlm.628,



ia tidak memberikan nafkah yang cukup untukku dan anakku, kecuali yang saya ambil tanpa sepengetahuannya. Maka apakah saya berdosa? Rasul menjawab: Ambil yang cukup untukmu dan anakmu dari hartanya secara ma'ruf'

Al-Qurthubiy sebagaimana dikutip ibn Hajar menjelaskan perintah Rasul kepada Hindun untuk mengambil harta Abu Sufyan dalam hadis di atas bermakna ibahah (kebolehan). Yang dimaksud dengan ma'ruf dalam hadis di atas adalah bahwa kadar yang diketahui dengan adat kebiasaan cukup baginya.<sup>57</sup> *Al-Syahi* dalam hadis diatas berarti lebih umum dari bakhil karena bakhil hanya berkenaan dengan harta sedangkan *al-Syahi* mencakup seluruh keadaan. Dikaitkannya istilah ini kepada Abu Sufyan karena ia tidak hanya menahan harta dari nafkah keluarganya tetapi juga dari dirinya.<sup>58</sup>

Dari berbagai uraian di atas dapat dipahami bahwa kewajiban nafkah menurut al-Quran dan Hadis ada di tangan suami atau ayah dalam keluarga. Bahkan bila seorang suami atau ayah tidak lagi mampu memberi nafkah karena sudah meninggal dunia, menurut Al-Jashshash terdapat perbedaan pendapat ulama tentang siapa yang wajib menafkahi. Umar bin Khattab berkata jika anak tidak memiliki ayah maka kewajiban nafkah ada pada ashabah. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa kewajiban nafkah ada pada ayah dan tidak ada pada ibu. Dengan demikian melalui pendkatan logika maka wajib dikhususkan kewajiban nafkah pada ashabah. Zaid bin Tsabit mengatakan bahwa kewajiban nafkah berbeda antara laki-laki dan perempuan berdasarkan proporsi bagian dalam waris. Malik mengatakan kewajiban nafkah hanya dikhususkan pada ayah dan tidak mencakup ashabah. Maka seorang kakek tidak diwajibkan menafkahi cucunya.

---

<sup>57</sup> *Ibid*, hlm. 635

<sup>58</sup> *Ibid*, hlm. 635

Syafii mengatakan bahwa tidak waib menafkahi pada anak yang masih kecil kecuali salah satu dari kerabat yaitu ayah, kakek, anak laki-laki, dan cucu laki-laki. Dalam pandangan al-Jashash dari berbagai perbedaan ulama tentang kewajiban nafkah atas ahli waris tidak ada yang mengatakan saudara atau paman memiliki kewajiban menafkahi anak.<sup>59</sup>

## 2. Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Indonesia

Pembentukan dan eksistensi lembaga Mahkamah Konstitusi merupakan sesuatu yang baru dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Jimly Asshiddiqie mengungkapkan sebagian besar negara-negara demokrasi yang sudah mapan tidak mengenal lembaga Mahkamah Konstitusi yang berdiri sendiri. Fungsinya biasanya dicakup dalam fungsi *supreme court* yang ada di setiap negara.<sup>60</sup>

Putusan dalam peradilan merupakan perbuatan hakim sebagai pejabat negara berwenang yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibuat secara tertulis untuk mengakhiri sengketa yang dihadapkan kepadanya.<sup>61</sup> Dengan demikian putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.<sup>62</sup>

---

<sup>59</sup> Al-Jashshash, *op.cit.*, h. 555

<sup>60</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme di Masa Depan*, (Jakarta: 2002, Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI) h. 88

<sup>61</sup> Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006), hlm. 235.

<sup>62</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1996) hlm. 176



Jenis putusan Mahkamah Konstitusi yang disimpulkan dari amarnya dapat dibedakan antara putusan yang bersifat *declaratoir*, *constitutief* dan *condemnatoir*. Suatu putusan dikatakan *condemnatoir* kalau putusan tersebut berisi penghukuman terhadap tergugat atau termohon untuk melakukan satu prestasi (*tot het verrichten van een prestatie*). Akibat dari putusan *condemnatoir* ialah diberikannya hak kepada penggugat/pemohon untuk meminta tindakan *eksekutorial* terhadap penggugat/termohon. Sedangkan putusan *declaratoir* adalah putusan dimana hakim menyatakan apa yang menjadi hukum. Putusan hakim yang menyatakan permohonan atau gugatan ditolak merupakan satu putusan yang bersifat *declaratoir*. Putusan *constitutief* adalah putusan yang menyatakan satu keadaan hukum atau menciptakan satu keadaan hukum baru. Menyatakan suatu undang-undang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945 adalah meniadakan keadaan hukum yang timbul karena undang-undang yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.<sup>63</sup>

Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan terbatas agar tidak tumpang tindih dengan lembaga kekuasaan kehakiman lainnya yang telah ada sebelumnya. Kewenangan tersebut di tuangkan dalam Pasal 24C UUD 1945 menyatakan:

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga

---

<sup>63</sup> Maruarar Siahaan, *op.cit.*, hlm. 241-242

negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

- (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Fungsi ini dirinci sesuai ketentuan UUD 1945 tersebut, dimana Mahkamah Konstitusi mempunyai wewenang sebagai berikut.

1. Menguji undang-undang terhadap UUD;
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara Memutus pembubaran partai politik;
3. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
4. Memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wapres telah melakukan pelanggaran hukum atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Dalam Pasal 50 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) menegaskan bahwa:

*Undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

Kemudian dalam Penjelasan Pasal 50 UU MK dijelaskan bahwa :

*Yang dimaksud dengan "setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" adalah perubahan pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tanggal 19 Oktober 1999.*



Kewenangan menguji UU bagi Mahkamah Konstitusi selanjutnya dijelaskan melalui pasal 57 ayat (2) UU nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan:

*Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat dan atau bagian UU yang bertentangan dengan UUD negara RI tahun 1945, materi muatan ayat, pasal dan/ atau bagian UU tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.*

Berdasarkan uraian di atas maka pengujian formil maupun materil Mahkamah Konstitusi terbatas pada konstusionalitas UU terhadap UUD 1945, yang langsung dapat dieksekusi dan tidak memerlukan keputusan pejabat lainnya dengan putusan yang final dan mengikat. Terkait dengan keputusan MK tentang akibat dari perkawinan yang sah, anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut adalah anak sah, memiliki hubungan keperdataan secara sempurna dengan kedua orang tuanya. Hubungan keperdataan yang dimaksud meliputi hak nasab (garis keturunan) anak dihubungkan kepada ayah (dalam Islam), hak pemenuhan nafkah dari orang tua terhadap anak, hak pemeliharaan dan pendidikan (hadhanah), hak saling mewarisi, hak perwalian nikah bagi ayah atas anak perempuan, dan hak-hak keperdataan lainnya.

Berbeda halnya dengan perkawinan yang sah, perkawinan tidak sah tidak memiliki akibat hukum apapun terhadap pihak yang terikat dalam perkawinan tersebut. Dalam hukum Islam, anak yang dilahirkan dalam perkawinan tidak sah tersebut dikenal istilah anak zina, yakni anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah atau dilahirkan dalam perkawinan yang sah tetapi disangkal oleh bapaknya sebagai anaknya melalui li'an.

Perbedaan kedudukan hukum antara anak sah dan anak luar nikah ini yang menyebabkan munculnya berbagai implikasi dalam hukum positif terutama pasca keluarnya putusan MK tentang no. 46/PUU/VIII/2012. Putusan yang dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi bersifat final, tidak memiliki upaya hukum untuk ditinjau kembali. Terkait dengan penelitian ini, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim dan Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono dengan putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memiliki pengaruh yang cukup besar dalam penerapan beberapa aturan hukum di Negara Republik Indonesia, khususnya beberapa aturan materil yang selama ini dijadikan sebagai rujukan dalam mengadili sebuah perkara di Pengadilan Agama. Persoalan yang menjadi pokok perkara dari pemohon dalam perkara tersebut adalah adanya dua pasal dalam UU perkawinan yakni pasal 22 ayat (2) serta pasal 43 ayat (1). Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan bahwa : "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku", sedangkan pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan: "Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya."

Kedua pasal ini sangat merugikan bagi pemohon karena menimbulkan ketidakpastian hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Pemohon berkaitan



dengan status perkawinan dan status hukum anaknya yang dihasilkan dari hasil perkawinan.

Dalam putusan ini, MK memandang bahwa norma hukum yang mengharuskan sebuah perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku telah mengakibatkan perkawinan yang sah dan sesuai dengan rukun nikah agama Islam (norma agama) menjadi tidak sah menurut norma hukum. Kemudian hal ini berdampak ke status anak yang dilahirkan Pemohon ikut tidak menjadi sah menurut norma hukum dalam UU Perkawinan.<sup>64</sup>

Untuk itu dalam *diktum* putusan MK tersebut dinyatakan:

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*", tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*".<sup>65</sup>

Dengan demikian dapat dilihat bahwa kedudukan hukum anak luar kawin dalam hukum Islam dan putusan MK berbeda, dimana dalam hukum Islam, salah satu akibat dari perkawinan yang tidak sah, anak yang dilahirkan tidak memiliki hubungan keperdataan secara sempurna dengan kedua orang tuanya. Hubungan keperdataan yang dimaksud meliputi hak nasab (garis keturunan) anak dihubungkan kepada ayah (dalam Islam), hak pemenuhan nafkah dari orang tua terhadap anak, hak pemeliharaan dan pendidikan (*hadhanah*), hak saling mewarisi,

<sup>64</sup> Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 pada bagian alasan-alasan permohonan uji materiil UU Perkawinan point 11 hlm. 8

<sup>65</sup> Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 pada bagian diktum, point 2. Hlm. 7

hak perwalian nikah bagi ayah atas anak perempuan, dan hak-hak keperdataan lainnya.

Meskipun terdapat perbedaan dalam hal akibat hukum dari peristiwa hukum kelahiran di luar pernikahan, di dalam peristiwa tersebut sesungguhnya hubungan hukum yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban secara bertimbal balik yang subjek hukumnya adalah anak, ibu dan bapak. Dengan demikian hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Mahkamah Konstitusi menyimpulkan bahwa Pasal 43 ayat (1) tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon dengan salah satu diktumnya mereview ketentuan Pasal 43 ayat (1) tersebut menjadi “anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Dengan diktum putusan MK ini maka berimplikasi pada kedudukan anak luar kawin tidak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja tetapi juga dengan ayahnya maupun kerabat ayahnya bila bisa dibuktikan secara hukum melalui alat bukti ilmu pengetahuan dan alat bukti lain. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pasca putusan MK ini kedudukan anak yang dilahirkan di luar



perkawinan yang sah dapat disamakan dengan kedudukan anak yang dilahirkan dalam pernikahan yang sah dalam seluruh aspek hubungan keperdataan.

Dalam putusan MK 46/PUU-VIII/2010 dinyatakan:<sup>66</sup>

Menimbang bahwa pokok permasalahan hukum mengenai pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan adalah mengenai makna hukum (*legal meaning*) pencatatan perkawinan. Mengenai permasalahan tersebut, Penjelasan Umum angka 4 huruf b UU 1/1974 tentang asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan menyatakan, "... bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan".

Berdasarkan Penjelasan UU 1/1974 di atas nyatalah bahwa (i) pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnya perkawinan; dan (ii) pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Adapun faktor yang menentukan sahnya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai.

Diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban administratif. Makna pentingnya kewajiban administratif berupa pencatatan perkawinan tersebut, menurut Mahkamah, dapat dilihat dari dua perspektif. Pertama, dari perspektif negara, pencatatan dimaksud diwajibkan dalam rangka fungsi negara memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang bersangkutan yang merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis yang diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan [*vide* Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945]. Sekiranya pencatatan dimaksud dianggap sebagai pembatasan, pencatatan demikian menurut Mahkamah tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusional karena pembatasan ditetapkan dengan Undang-Undang dan dilakukan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis [*vide* Pasal 28J ayat (2) UUD 1945].

Kedua, pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh negara dimaksudkan agar perkawinan, sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan yang bersangkutan dapat terselenggara secara efektif dan efisien. Artinya, dengan dimilikinya bukti otentik perkawinan, hak-hak yang timbul sebagai akibat perkawinan dapat terlindungi dan terlayani dengan baik, karena tidak diperlukan proses pembuktian yang memakan waktu, uang, tenaga, dan pikiran yang lebih banyak, seperti pembuktian mengenai asal-usul anak dalam Pasal 55 UU 1/1974 yang mengatur bahwa bila asal-usul anak tidak dapat dibuktikan dengan akta otentik maka mengenai hal itu akan ditetapkan dengan putusan pengadilan yang berwenang. Pembuktian yang demikian pasti tidak lebih efektif dan efisien bila dibandingkan dengan adanya akta otentik sebagai buktinya;

<sup>66</sup> Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 pada bagian pendapat mahkamah, point 3:13.  
Hlm. 35



Berdasarkan perbandingan antara kedua aturan hukum tersebut, sebenarnya terdapat perbedaan hukum tentang penetapan anak biologis berdasarkan pencatatan pernikahan dimana menurut hukum Islam baik sebagaimana yang diatur dalam KHI dan juga UU perkawinan tidak mengakui keabsahan perkawinan yang tidak dicatatkan, namun dalam keputusan MK diakui berdasarkan pembuktian dan putusan pengadilan. Dalam hal ini penulis melihat perbedaan keduanya terletak dalam kesempatan adanya upaya hukum yang disediakan melalui putusan MK untuk melakukan upaya hukum terhadap penetapan nasab anak dalam pernikahan yang tidak dicatatkan.

Status anak yang dilahirkan di luar perkawinan dalam Islam hanya memiliki hubungan dengan ibu dan keluarga ibunya sebagai hubungan yang tidak bisa disangkal bersifat alamiah. Di dalam Islam yang dihubungkan nasabnya kepada ayah hanyalah anak yang dilahirkan sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Ketentuan seperti ini pada dasarnya bukan untuk menghukum sang anak tapi untuk memperkuat efek jera kepada ayah dan ibu yang melakukan hubungan di luar ikatan perkawinan yang sah.

Namun pada kenyataannya, karena anak yang lahir di luar nikah hanya memiliki hubungan dengan ibunya, maka anak tersebut tidak memiliki hak apapun dari ayah biologisnya, karena secara hukum baik hukum agama maupun hukum nasional dia tidak memiliki pertalian darah (nasab) dengan laki-laki yang merupakan ayah biologisnya. Sehingga oleh sebab itu anak di luar nikah tidak memperoleh hak-hak materil dan moril yang semestinya harus diperoleh oleh



seorang anak dari ayahnya, seperti hak pemeliharaan, hak nafkah, hak perwalian nikah bagi anak perempuan, dan hak saling mewarisi ketika terjadi kematian.

Hal inilah yang dipertimbangkan MK yang menyatakan:<sup>67</sup>

Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, maka anak Pemohon hanya mempunyai hubungan keperdataan ke ibunya, dan hal yang sama juga dianut dalam Islam. Hanya saja hal ini menjadi tidak benar, jika norma hukum UU Perkawinan menyatakan seorang anak di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, karena berpijak pada sah atau tidaknya suatu perkawinan menurut norma hukum. Begitupun dalam Islam, perkawinan yang sah adalah berdasarkan ketentuan yang telah diatur berdasarkan Al- Quran dan Sunnah, dalam hal ini, perkawinan Pemohon adalah sah dan sesuai rukun nikah serta norma agama sebagaimana diajarkan Islam.

Perkawinan Pemohon bukanlah karena perbuatan zina atau setidaknya dianggap sebagai bentuk perzinahan. Begitu pula anaknya adalah anak yang sah. Dalam pandangan Islam hal yang berbeda dan sudah barang tentu sama dengan ketentuan dalam UU Perkawinan adalah menyangkut seorang wanita yang hamil dan tidak terikat dalam perkawinan maka nasib anaknya adalah dengan ibu dan keluarga ibunya. Jadi, pertanyaannya adalah bagaimana mungkin perkawinan yang sah menurut norma agama, tetapi norma hukum meredusirnya menjadi tidak sah?

Dengan berlakunya Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, maka hak-hak konstitusional Pemohon selaku ibu dan anaknya untuk mendapatkan pengesahan atas pernikahannya serta status hukum anaknya yang dijamin oleh Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah dirugikan;

KUH Perdata Pasal 299 juga mengatur tentang asas-asas kekuasaan orang tua. Pasal itu menentukan bahwa selama perkawinan orang tua berlangsung maka anak ada dalam kekuasaan orang tua sampai anak itu menjadi *meerderjarig* (telah dewasa) kalau selama itu kekuasaan orang tua itu *onzet* (tidak dicabut) dan/atau *ontheven* (dibebaskan). Disamping itu kekuasaan orang tua juga dapat berakhir dengan pembebasan oleh pengadilan ataupun matinya seorang anak. Dengan demikian, maka dalam Pasal 299 BW ini terdapat 3 buah azas:

- a. Kekuasaan orang tua ada pada kedua orang tua itu dan tidak hanya ada pada bapak saja;

<sup>67</sup> Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 pada bagian alasan pemohon, point 12 hlm. 7

- b. Kekuasaan orang tua hanya ada selama perkawinan berlangsung sehingga kalau perkawinan itu putus maka kekuasaan orang tua itu tidak ada lagi sehingga kekuasaan terhadap anak sebatas status perwalian (pasal 299 BW);
- c. Kekuasaan orang tua hanya ada selama orang tua itu memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap anak-anaknya dengan baik, kalau tidak maka akan ada kemungkinan kekuasaan orang tua itu dicabut atau dibebaskan.<sup>68</sup>

Berdasarkan aturan diatas maka dalam hal pencabutan dan pembebasan kekuasaan orang tua diperlukan keputusan hakim dimana hakim dapat mencabut kekuasaan dari tiap-tiap orang tua atas salah seorang atau semua anaknya. Gugurnya kedudukan ayah biologis dengan adanya kelahiran anak di luar pernikahan sebagaimana yang diatur dalam hukum Islam, berbeda dengan yang diatur dalam putusan MK ini. Seorang ayah biologis tetap memiliki kekuasaan hukum atas anaknya selama tidak dicabut oleh pengadilan.

---

<sup>68</sup> R . Soetojo prawirohamidjojo dan Asis Safioeden. *Hukum orang dan keluarga*. (Bandung: 1986, Alumni) hlm. 148-150



### BAB III

## METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Dari segi jenis penelitian, penelitian ini termasuk dalam golongan penelitian hukum sosiologis (*sociological empirics research*). Subjek penelitian ini adalah para ulama yang terlibat secara langsung dalam program dakwah terutama da'i yang aktif dalam lembaga dakwah. Sedangkan objek penelitian ini adalah persepsi para ulama terkait bagaimana implikasi hukum tentang penasaban anak luar nikah kepada ayah biologis sesuai tuntutan Keputusan Mahkamah Konstitusi. Penetapan informan dilakukan dengan tehnik *Non Probabilitas* atau *Non Random Sampling* dalam hal ini dipakai *Purposive Sampling* dengan cara mengambil subyek didasarkan pada tujuan tertentu.<sup>69</sup> Berdasarkan penetapan responden sebagaimana di atas maka peneliti berupaya menemukan informasi melalui kuessioner kepada 100 orang ulama dengan karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan, pekerjaan utama, serta pengalaman mereka.

### B. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dituju dari penelitian ini adalah data primer dan sekunder yang terkait dengan aspek analisis Putusan MK terkait anak luar perkawinan dalam perbandingan hukum Islam dan Positif. Berbagai sumber data yang penulis

---

<sup>69</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990), h. 87

dapatkan melalui sumber diatas dikumpulkan dengan menggunakan metode kuessioner dan wawancara.

Penetapan informan dilakukan dengan tehnik *Non Probabilitas* atau *Non Random Sampling* dalam hal ini dipakai *Purposive Sampling* dengan cara mengambil subyek didasarkan pada tujuan tertentu.<sup>70</sup> Informan dalam penelitian ini adalah tokoh ulama yang berperan di tengah masyarakat yang diukur melalui rekomendasi dari pengurus mesjid atau mushalla yang ada di daerah penelitian. Untuk itu dalam menentukan populasi penulis mengambil sampel dari kecamatan yang ada di Pekanbaru Untuk menghindari bias dalam pengumpulan data, sebelum kuesioner diisi oleh responden, terlebih dahulu dilakukan konfirmasi tentang peranan mereka sebagai tokoh agama di tengah masyarakat dalam berbagai kegiatan keagamaan. Atas dasar asumsi tersebut peneliti menetapkan responden penelitian ini sebagai berikut:

**Tabel III.1**  
**Sampel Penelitian**

No	Kecamatan	Sampel	Proporsi (%)
1	Senapelan	5 orang	7,14
2	Pekanbaru Kota	5 orang	7,14
3	Sukajadi	5 orang	7,14
4	Sail	5 orang	7,14
5	Lima Puluh	5 orang	7,14
6	Rumbai	5 orang	7,14
7	Rumbai Pesisir	5 orang	7,14
8	Bukit Raya	10 orang	14,28
9	Marpoyan Damai	5 orang	7,14
10	Tenayan Raya	5 orang	7,14
11	Tampan	10 orang	14,28

<sup>70</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990), h. 87



12	Payung Sekaki	5 orang	7,14
<b>J U M L A H</b>		<b>70 orang</b>	<b>100 %</b>

Berdasarkan penetapan responden sebagaimana di atas maka peneliti berupaya menemukan informasi melalui kuessioner kepada 71 orang da'i dengan karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan, pekerjaan utama, serta pengalaman menjadi muballigh. Berdasarkan umur, tingkat pendidikan para responden dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel III.2**  
**Karakter Responden Penelitian Berdasarkan Umur**

No	Umur Responden	Populasi	Proporsi (%)
1	20 – 30 tahun	1	1,41
2	30 – 40 tahun	30	42,25
3	40 – 50 tahun	23	32,39
4	50 – 60 tahun	4	7,04
5	Lebih dari 60 tahun	12	16,90
<b>J U M L A H</b>		<b>70</b>	<b>100 %</b>

Sumber : Data olahan

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa pada umumnya responden berusia antara 30 sampai 50 tahun dimana ada 42,25% responden berusia 30-40 tahun dan 32,29 % responden berusia 40-50 tahun. Selanjutnya karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel III.3**  
**Karakter Responden Penelitian Tingkat Pendidikan Terakhir**

No	Tingkat Pendidikan	Populasi	Persentase (%)
1	Tingkat Sekolah Dasar	0	0
2	Tingkat Sekolah Menengah	14	19,72

3	Tingkat S1	49	70,42
4	Tingkat S2	7	9,86
5	Tingkat S3	0	2,82
J U M L A H		70	100

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa responden pada umumnya (70,42%) berpendidikan S1. Selanjutnya karakteristik responden berdasarkan pekerjaan dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel III.4**

**Karakter Responden Penelitian Berdasarkan Pekerjaan**

No	Tingkat Pendidikan	Populasi	Proporsi (%)
1	Pegawai Negeri Sipil	24	33,80
2	Karyawan Swasta	18	25,35
3	Wirausaha	21	29,57
4	Lainnya	7	11,27
J U M L A H		70	100 %

Sumber : Data Olahan

### C. Analisis Data

Data primer yang diperoleh melalui penelusuran bahan kepustakaan dianalisis melalui analisis komperatif. Sebelumnya data primer dan sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, dipilih dan dihimpun serta diadakan pengorganisasian, selanjutnya disusun secara sistematis untuk memudahkan analisis. Data primer dan data sekunder yang telah dikumpulkan dan di organisir, kemudian dianalisis berdasarkan pendekatan kualitatif secara normatif, yaitu



dengan memperhatikan fakta yang ada dalam praktek dan digabungkan dengan data sekunder yang diperoleh di kepustakaan, sehingga dapat diperoleh diskripsi tentang tanggungjawab hukum ayah biologis dan anak luar perkawinan terutama pasca putusan MK diatas. Selanjutnya dengan metode komperatif ini akan dilakukan eksplorasi terhadap persepsi para ulama di kota Pekanbaru terkait dengan implikasi putusan MK tersebut dalam sosio religius masyarakat kota Pekanbaru.

## BAB IV

### PERSEPSI ULAMA DI PEKANBARU TERHADAP PUTUSAN

#### MAHKAMAH KONSTITUSI NO 46 /PUU-VIII/2010

#### TENTANG STATUS ANAK DI LUAR KAWIN

##### A. Persepsi Para Ulama Terhadap Putusan MK tentang Hubungan Anak Luar Nikah dan Ayah Biologis

Kata persepsi merupakan kata yang berasal dari bahasa Inggris “*perception*” yang berarti tanggapan. Sedangkan menurut para ahli diantaranya yaitu:

- 1) Jalaludin Rahmat mendefinisikan bahwa persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa / hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.<sup>71</sup>
- 2) Sarlito Wirawan mengemukakan bahwa persepsi merupakan kemampuan untuk membedakan, mengelompokkan, memfokuskan semua obyek disebut sebagai kemampuan untuk mengorganisasikan pengamatan.<sup>72</sup>
- 3) Menurut Hasan Shadily dalam Ensiklopedi Indonesia menjelaskan, persepsi adalah proses mental yang menghasilkan bayangan pada diri individu, sehingga dapat mengenal suatu objek dengan jalan asosiasi pada sesuatu

---

<sup>71</sup>Jalaluddin Rahmat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1996),

h. 51

<sup>72</sup>Sarlito Wirawan Sarwono, *Pengantar Umum Psikologi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1982),

h. 44



ingatan tertentu, baik secara indera penglihatan, indera perabaan, dan sebagainya, sehingga bayangan itu dapat disadari.<sup>73</sup>

- 4) Sedangkan menurut Bimo Walgito "persepsi" adalah suatu proses yang didahului oleh penginderaan yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat reseptornya dan stimulus itu diteruskan ke syaraf dan terjadilah proses psikologi sehingga individu menyadari adanya apa yang ia lihat, apa yang ia didengar.<sup>74</sup>

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah tanggapan terhadap suatu objek dengan memberikan penilaian terhadap objek tersebut melalui suatu proses kompleks yang menyebabkan orang dapat menerima atau meringkas informasi yang diperoleh dari lingkungannya. Persepsi dianggap sebagai kegiatan awal struktur kognitif seseorang sehingga akan mempengaruhi cara pandang seseorang terhadap suatu objek.

Persepsi seseorang terhadap suatu objek tidak hanya timbul begitu saja. Menurut Bimo Walgito, ada beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi tersebut, antara lain:<sup>75</sup>

- 1) Adanya obyek persepsi yang dapat menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau reseptor. Stimulus dapat datang dari luar individu yang memersepsi, tetapi juga dapat datang dari individu yang bersangkutan

---

<sup>73</sup>Hasan Shadily, *Ensiklopedi Indonesia*, (Jakarta: PT Ichthiar Baru Van Hoeve, tth), h. 2684.

<sup>74</sup>Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), h. 53

<sup>75</sup>*Ibid.*, h. 54

langsung mengenai syaraf penerima yang bekerja sebagai reseptor. Namun sebagian besar stimulus datang dari luar individu.

- 2) Adanya indera saraf dan pusat susunan saraf sebagai alat untuk menerima stimulus. Disamping itu juga harus ada syaraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang diterima reseptor ke pusat susunan syaraf, yaitu otak sebagai pusat kesadaran. Sebagai alat untuk mengadakan respon diperlukan syaraf motoris.
- 3) Adanya perhatian sebagai langkah pertama sebagai persiapan dalam rangka mengadakan persepsi. Perhatian merupakan pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang ditunjukkan kepada sesuatu atau sekumpulan objek.

Persepsi menjadi landasan berpikir bagi seseorang dalam belajar, persepsi dalam belajar berpengaruh terhadap daya ingat, pembentukan konsep, sikap dan tindakan.<sup>76</sup> Ada beberapa tahapan dalam proses terjadinya persepsi pada individu, yaitu obyek menimbulkan stimulus, dan stimulus mengenai alat indera atau reseptor. Perlu diketahui bahwa antara objek dan stimulus itu berbeda, tetapi ada kalanya bahwa objek dan stimulus itu menjadi satu, misalnya hal tekanan. Tahapan-tahapan dalam proses terjadinya persepsi dimulai dari Proses fisik atau kealaman, Proses fisiologis, yaitu stimulus yang diterima oleh alat indera kemudian dilanjutkan oleh syaraf sensorik ke otak serta Proses psikologis, yaitu proses yang terjadi dalam otak sebagai pusat kesadaran sehingga individu dapat

---

<sup>76</sup>Dewi Salma Prawiradilga dan Eveline Siregar, *Mozaik Teknologi Pendidikan*, (Jakarta: Kencana, 2008), Cet 3, h. 134



menyadari apa yang dilihat didengar, atau diraba dengan reseptor itu, sebagai suatu akibat dari stimulus yang diterimanya.<sup>77</sup>

Persoalan yang dihadapi umat Islam dewasa ini berkembang sesuai dengan dinamika kehidupan manusia dalam berbagai aspeknya. Dalam aspek kehidupan rumah tangga, berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat. Dewasa ini berbagai fenomena dan persoalan baru lahir di tengah umat Islam. Hal ini menuntut keberadaan para pemimpin umat untuk menyelesaikan berbagai persoalan tersebut sebagaimana secara tegas di dalam Alquran memerintahkan agar umat Islam mengikuti petunjuk ulama. Ulama yang dimaksudkan dalam Alquran sebagaimana penjelasan hadis, adalah pewaris Nabi. Dengan demikian kepatuhan kaum muslimin terhadap ajaran Islam seharusnya menjadi modal yang sangat besar dan penting dalam pengembangan segala ajaran Islam, termasuk di dalamnya hubungan keperdataan dalam keluarga.

Namun istilah ulama di masa kini sering kali menjadi rancu dan tertukar-tukar dengan istilah lain yang nyaris beririsan. Padahal keduanya tetap punya perbedaan mendasar. Misalnya, seorang yang berprofesi sebagai penceramah, seringkali disebut-sebut sebagai ulama, meski tidak punya kapasitas otak para ulama. Kemampuannya di bidang ilmu syariah, jauh dari kriteria seorang ulama. Penceramah adalah sekedar orang yang pandai berpidato menarik massa, punya daya pikat tersendiri ketika tampil di publik, mungkin sedikit banyak pandai menyitir satu dua ayat Quran dan hadits, tetapi begitu ditanyakan kepadanya, apa derajat hadits itu, ada di kitab apa, siapa saja perawinya, dan seterusnya, belum

---

<sup>77</sup>Bimo Walgito, *op. cit.*, h. 54



tentu dia tahu. Bahkan tidak sedikit penceramah yang buta dengan huruf arab, alias tidak paham membaca kitab berbahasa arab. Padahal sumber-sumber keislaman hanya terdapat dalam bahasa arab. Bahkan terkadang terjadi fenomena sebaliknya, banyak orang yang sudah sampai kepada level ulama, punya ilmu banyak dan mendalam, tetapi kurang kurang menarik ketika berbicara di muka publik. Untuk menghindari kerancuan di atas maka yang dimaksud ulama dalam penelitian ini adalah tokoh agama yang selalu menjadi pemimpin dari kegiatan rohaniah keagamaan atau menjadi tokoh agama berdasarkan posisi dan peran mereka dalam organisasi keagamaan yang ada di tengah masyarakat. Untuk itu penulis melakukan identifikasi terhadap tokoh-tokoh tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam metode pengumpulan data pada bab sebelumnya.

Dengan pemahaman di atas maka untuk melihat bagaimana tingkat pengetahuan ulama tentang pergeseran hubungan keperdataan ayah biologis dan anak luar nikah terlebih dahulu ditetapkan indikator dari variable penelitian tentang bagaimana tingkat pengetahuan ulama tentang hubungan keperdataan tersebut. Secara lebih rinci hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel IV.1.**  
**Variabel dan Indikator Penelitian**

Masalah	Variabel	Indikator
Persepsi Ulama tentang Hubungan Keprdataan Anak Luar Nikah dan Ayah Biologis	1. Persepsi responden tentang Kedudukan anak luar nikah dalam perspektif Hukum Islam	• Persepsi tentang keabsahan perkawinan menurut hukum Islam
		• Persepsi tentang pengertian anak luar nikah
		• Persepsi tentang kewajiban nafkah
		• Persepsi tentang hubungan kewarisan



		• Persepsi tentang wali nikah
		• Persepsi tentang hak asuh
		• Persepsi tentang nasab
	2. Pemahaman Responden tentang perubahan hukum Kedudukan anak luar nikah setelah putusan MK	• Persepsi tentang kedudukan MK
		• Persepsi tentang sifat keputusan MK
		• Persepsi tentang pokok perkara putusan MK NO 46 /PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Di Luar Kawin
		• Persepsi tentang pertimbangan hukum putusan MK NO 46 /PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Di Luar Kawin
		• Persepsi tentang implikasi putusan MK NO 46 /PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Di Luar Kawin

Berdasarkan indikator di atas berikut peneliti mengawali pemaparan tentang persepsi para responden dimulai dari tingkat pemahaman mereka terhadap konsepsi normative dari hukum Islam tentang anak luar nikah dan setelah itu dibandingkan dengan perubahan hukum yang terjadi setelah putusan hukum MK MK NO 46 /PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Di Luar Kawin. Pertanyaan pertama untuk mengukur tingkat pemahaman para responden terkait dengan keabsahan pernikahan adalah kedudukan pencatatan pernikahan sebagai syarat dari keabsahan perkawinan menurut hukum Islam. Tingkat pemahaman para responden dalam hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel IV.2.**

**Jawaban Responden Tentang Perkawinan tidak dicatatkan**

No	Jawaban	Populasi	(%)
1	Absah menurut hukum Islam dan Positif	2	2,857
2	Absah menurut hukum Islam namun tidak sah menurut hukum Positif	68	97,14



3	Tidak Absah menurut hukum Islam dan sah menurut hukum Positif	0	0
4	Tidak Absah menurut hukum Islam dan Positif	0	0
	<b>JUMLAH</b>	70	100

Berdasarkan tabel di atas pada umumnya responden sudah mengetahui menyatakan bahwa pernikahan yang tidak dicatikan Absah menurut hukum Islam namun tidak sah menurut hukum Positif, dan hanya 2 orang saja yang mengatakan sah menurut hukum Islam dan hukum Positif. Hal ini didasarkan pada pemahaman salah seorang responden yang mengatakan bahwa sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Namun bila dibandingkan dengan ayat (2) dimana tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku memberikan implikasi bahwa perkawinan tidak sah bila tidak dicatatkan atau Perkawinan sah apabila dicatatkan dalam perspektif hukum positif. Jadi sah atau tidaknya suatu perkawinan dalam perspektif hukum Islam bukan ditentukan oleh pencatatan, melainkan disyaratkan dengan dilangsungkan secara hukum Islam itu sendiri. Hal ini terlihat dalam implikasi pengakuan Negara terhadap status hukum nikah yang tidak dicatatkan terutama dalam hal perceraian dimana pengadilan agama tidak menerima berkas perceraian apabila tidak memiliki akta nikah yang otentik. Demikian juga dalam pengurusan akte kelahiran anak akta nikah yang otentik merupakan syarat utama.<sup>78</sup> Namun menurut responden lainnya, pernikahan yang tidak dicatatkan

---

<sup>78</sup> Drs. H. Jidal. BA., Tokoh Agama kecamatan Tenayan Raya, Wawancara, Pekanbaru, Oktober 2015



dapat diakui keabsahannya menurut hukum positif bila diitsbatkan oleh lembaga yang berwenang.<sup>79</sup> Dengan demikian pada dasarnya pernikahan yang tidak dicatatkan diakui oleh hukum positif hanya bila didukung oleh akta otentik mengenai pernikahan.

Selanjutnya untuk melihat bagaimana pemahaman lebih jauh para responden tentang pengertian dan kedudukan hukum anak terkait dengan keabsahan pernikahan dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel IV.3.**

**Pemahaman para Responden tentang kedudukan hukum anak terkait pernikahan**

No	Pertanyaan	Jawaban		
		Anak Sah	Tdk Sah	Anak Sumbang/syubhat
1	Anak yang dilahirkan dalam ikatan pernikahan yang tidak dicatatkan	68	2	0
2	Anak yang dilahirkan diluar ikatan pernikahan	0	70	0
3	Anak yang dilahirkan dalam ikatan pernikahan yang sah tapi tidak cukup umur (didahului dengan perbuatan zina)	0	70	0
4	Anak yang dilahirkan dalam ikatan pernikahan yang sah tapi tidak antara ibu dan ayah biologisnya tapi dengan orang lain	0	66	4
JUMLAH				

<sup>79</sup> M. Ali Nasution., Tokoh Agama kecamatan Senapelan, Wawancara, Pekanbaru, Oktober 2015

Dari keempat pertanyaan di atas dapat disimpulkan bahwa terkait dengan kedudukan hukum anak yang dilahirkan dalam ikatan pernikahan yang tidak dicatatkan hamper seluruh responden menyatakannya sebagai anak sah. Sementara terkait dengan anak yang dilahirkan diluar ikatan pernikahan semuanya sepakat mengatakan sebagai anak yang tidak sah, sama dengan bila anak tersebut dilahirkan dalam ikatan pernikahan yang sah tapi tidak cukup umur artinya didahuli dengan perbuatan zina. Di dalam masyarakat sendiri seringkali pernikahan akibat perzinahan dilakukan sebagai cara untuk menutup malu sebagaimana anak yang dilahirkan dalam ikatan pernikahan yang sah tapi tidak antara ibu dan ayah biologisnya tapi dengan orang lain. Dalam hal ini responden pada umumnya mengkategorikannya sebagai anak tidak sah dan hanya 4 orang yang mengatakan sebagai anak syubhat.

Berdasarkan tabel di atas pada umumnya responden sudah mengetahui bahwa kedudukan hukum tentang keabsahan anak bergantung pada waktu akad nikah dan pembuahan dimana bila anak tersebut lahir sebagai hasil pembuahan sebelum akad nikah berlangsung maka itu termasuk kategori anak zina. Terkait dengan hubungan keperdataan anak luar nikah dengan ayah biologisnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel IV.4.**

**Pemahaman para Responden tentang Hubungan anak luar nikah dan ayah biologis**

No	Hubungan KEperdataan	Ya	Tidak
1	Wali Nikah	0	70



2	Kewarisan	0	70
3	Nasab	0	70
4	Hadhanah	0	70
5	Nafkah	62	8

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa pada umumnya pemahaman responden melihat bahwa tidak ada hubungan keperdataan antara anak zina atau anak luar nikah dengan ayah biologisnya dalam hal perwalian, hanya saja dalam hal kewajiban nafkah ada 8 orang responden yang mengatakan bahwa dalam sistem kewajiban nafkah masih ada hubungan keperdataan. Menurut salah seorang responden ia melihat bahwa ada perbedaan tentang hubungan kewajiban nafkah dengan hubungan keperdataan lainnya. Hal ini didasarkan bahwa bagaimanapun anak dalam lingkungan keluarga adalah tanggungjawab ayahnya baik ayah biologis maupun ayah secara hukum.<sup>80</sup> Namun responden lainnya mengatakan bahwa tidak ada hubungan keperdataan secara mutlak karena dasarnya sudah tidak ada hubungan hukum maka selamanya tidak akan ada hubungan hukum apalagi menyangkut hak dan kewajiban keperdataan.<sup>81</sup>

Dari berbagai uraian diatas dapat dipahami bahwa secara umum responden dalam hal keabsahan perkawinan, pemahaman tentang anak luar nikah dan hubungan keperdataan didasarkan pada pemahaman mereka tentang hukum

<sup>80</sup> Yudhi Irwan, M.Si., Tokoh Agama kecamatan Pekanbaru Kota, Wawancara, Pekanbaru, Oktober 2015

<sup>81</sup> H. Supriyanto, S.Ag., Tokoh Agama kecamatan Sukajadi, Wawancara, Pekanbaru, Oktober 2015

keluarga menurut hukum Islam sebagaimana yang dipahami jumhur ulama terdahulu.

Selanjutnya untuk melihat bagaimana tingkat pemahaman tersebut bila dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi diawali dengan pertanyaan tentang kedudukan Mahkamah konstitusi dalam tata Negara di Indonesia. Terkait dengan hal ini penulis menemukan tanggapan responden sebagaimanaberikut:

**Tabel IV.5.**

**Pemahaman para Responden tentang kedudukan MK dalam tata negara**

No	Jawaban	Populasi	%
1	Mahkamah Konstitusi adalah lembaga peradilan sama kedudukannya dengan Mahkamah Agung	50	71,43
2	Mahkamah Konstitusi adalah lembaga peradilan sama kedudukannya dengan kementrian	6	8,571
3	Mahkamah Konstitusi adalah lembaga peradilan sama kedudukannya dengan presiden	2	2,857
4	Tidak menjawab	12	17,14
J U M L A H		70	100 %

Berdasarkan tabel di atas pada umumnya (71,43%) responden telah memahami kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang sama dengan Mahkamah Agung. Selanjutnya mengenai kompetensi Mahkamah Konstitusi dapat dilihat dalam tabel berikut:



**Tabel IV.6.**  
**Pemahaman para Responden tentang Kompetensi MK**

No	Jawaban	Jawaban Benar	%
1	Memeriksa dan mengadili perkara sengketa PEMILU	66	94,29
2	Memeriksa dan mengadili perkara peninjauan kembali undang-undang	41	58,57
3	Memeriksa dan mengadili perkara sengketa lembaga Negara	21	30
4	memutus pembubaran partai politik	28	40
5	memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.	5	7,143

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa pada umumnya responden hanya mengetahui kewenangan Mahkamah konstitusi dalam hal mengadili perkara yang terkait dengan sengketa PILKADA dan yudisial review. Sesungguhnya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan terbatas agar tidak tumpang tindih dengan lembaga kekuasaan kehakiman lainnya yang telah ada sebelumnya. Kewenangan tersebut di tuangkan dalam Pasal 24C UUD 1945 menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat

mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan mengenai keberadaan putusan mahkamah konstitusi NO 46 /PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Di Luar Kawin dalam hal sifat keputusan MK, pokok perkara, pertimbangan hukum dan dictum keputusan tersebut. Jawaban responden dalam hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel IV.7.**  
**Persepsi responden tentang PUU no. 46/PUU-VIII/2010**

No	Jawaban	Jawaban Tahu	%
1	sifat keputusan MK bersifat final dan mengikat	48	68,57
2	Pokok perkara putusan MK NO 46 /PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Di Luar Kawin	1	1,429
3	Pertimbangan hukum putusan MK NO 46 /PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Di Luar Kawin	0	0
4	Dictum putusan MK NO 46 /PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Di Luar Kawin	0	0

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa responden pada umumnya mngerti sifat keputusan Mahkamah Konstitusi namun hanya sedikit yang mengetahui tentang adanya putusan MK NO 46 /PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Di Luar Kawin tersebut. Hal ini memperlihatkan bahwa sosialisasi terhadap putusan MK ini masih belum menyentuh kepada masyarakat bahkan para tokoh agama tidak menyadari adanya putusan MK ini dan bagaimana pengaruhnya terhadap masyarakat. Hal ini diakui seorang responden bahwa sosialisasi melalui media



masih belum maksimal sehingga banyak masyarakat yang seharusnya menyadari hal tersebut justru tidak mengetahuinya.<sup>82</sup>

Perbedaan kedudukan hukum antara anak sah dan anak luar nikah ini yang menyebabkan munculnya berbagai implikasi dalam hukum positif terutama pasca keluarnya putusan MK tentang no. 46/PUU/VIII/2012. Putusan yang dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi bersifat final, tidak memiliki upaya hukum untuk ditinjau kembali. Terkait dengan penelitian ini, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim dan Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono dengan putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memiliki pengaruh yang cukup besar dalam penerapan beberapa aturan hukum di Negara Republik Indonesia, khususnya beberapa aturan materil yang selama ini dijadikan sebagai rujukan dalam mengadili sebuah perkara di Pengadilan Agama. Persoalan yang menjadi pokok perkara dari pemohon dalam perkara tersebut adalah adanya dua pasal dalam UU perkawinan yakni pasal 22 ayat (2) serta pasal 43 ayat (1). Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan bahwa : "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku", sedangkan pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan: "Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya."

---

<sup>82</sup> Syukrianto., Tokoh Agama kecamatan Sail , Wawancara, Pekanbaru, Oktober 2015



Kedua pasal ini sangat merugikan bagi pemohon karena menimbulkan ketidakpastian hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Pemohon berkaitan dengan status perkawinan dan status hukum anaknya yang dihasilkan dari hasil perkawinan.

Dalam putusan ini, MK memandang bahwa norma hukum yang mengharuskan sebuah perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku telah mengakibatkan perkawinan yang sah dan sesuai dengan rukun nikah agama Islam (norma agama) menjadi tidak sah menurut norma hukum. Kemudian hal ini berdampak ke status anak yang dilahirkan Pemohon ikut tidak menjadi sah menurut norma hukum dalam UU Perkawinan.<sup>83</sup>

Untuk itu dalam *diktum* putusan MK tersebut dinyatakan:

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*", tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut **harus dibaca**, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*".<sup>84</sup>

Dengan demikian dapat dilihat bahwa kedudukan hukum anak luar kawin dalam hukum Islam dan putusan MK berbeda, dimana dalam hukum Islam, salah satu akibat dari perkawinan yang tidak sah, anak yang dilahirkan tidak memiliki hubungan keperdataan secara sempurna dengan kedua orang tuanya. Hubungan keperdataan yang dimaksud meliputi hak nasab (garis keturunan) anak

<sup>83</sup> Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 pada bagian alasan-alasan permohonan uji materiil UU Perkawinan point 11 hlm. 8

<sup>84</sup> Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 pada bagian diktum, point 2. Hlm. 7



dihubungkan kepada ayah (dalam Islam), hak pemenuhan nafkah dari orang tua terhadap anak, hak pemeliharaan dan pendidikan (hadhanah), hak saling mewarisi, hak perwalian nikah bagi ayah atas anak perempuan, dan hak-hak keperdataan lainnya.

Meskipun terdapat perbedaan dalam hal akibat hukum dari peristiwa hukum kelahiran di luar pernikahan, di dalam peristiwa tersebut sesungguhnya hubungan hukum yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban secara bertimbal balik yang subjek hukumnya adalah anak, ibu dan bapak. Dengan demikian hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Mahkamah Konstitusi menyimpulkan bahwa Pasal 43 ayat (1) tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon dengan salah satu diktumnya merevisi ketentuan Pasal 43 ayat (1) tersebut menjadi "anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya".

Dengan diktum putusan MK ini maka berimplikasi pada kedudukan anak luar kawin tidak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja tetapi juga dengan ayahnya maupun kerabat ayahnya bila bisa dibuktikan secara hukum melalui alat bukti ilmu pengetahuan dan alat bukti lain. Dengan demikian dapat

dipahami bahwa pasca putusan MK ini kedudukan anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah dapat disamakan dengan kedudukan anak yang dilahirkan dalam pernikahan yang sah dalam seluruh aspek hubungan keperdataan.

Namun demikian praktis setelah 5 tahun Putusan ini diputuskan Mahkamah Konstitusi belum ada upaya sosialisasi kepada masyarakat. Hal ini dapat dipahami melalui upaya respsi hukum Islam dalam Peraturan Perundang-undangan. Di era reformasi ini dapat dikatakan bahwa secara politis-yuridis telah mengalami kemajuan dengan adanya keberpihakan pemerintah terhadap umat Islam untuk melegalisasi syari'at Islam menjadi hukum nasional, walaupun masih sebatas diwilayah hukum privat yang berkenaan dengan ubudiyah dan muamalah (perdata Islam). Sedangkan diwilayah hukum publik yang berhubungan dengan jinayah (pidana Islam), sampai sekarang hanya dalam bentuk wacana para ahli hukum sebagai naskah akademis.

Kebijakan pemerintah dalam hukum tidak lepas dari politik hukum Indonesia. Menurut Soedarto politik hukum adalah kebijakan dari negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.<sup>135</sup> Sedangkan menurut C.F.G Sunaryati Hartono, politik hukum sebagai alat (*tool*) atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional yang dikehendaki dan dengan sistem hukum nasional itu akan diwujudkan cita-cita bangsa Indonesia.<sup>85</sup> Hukum Islam bukanlah

---

<sup>85</sup> *Ibid.*, h. 27



sesuatu yang harus dijadikan momok bagi masyarakat yang adil dan sejahtera karena hal ini telah terbukti sejak periode Piagam Madinah di mana kaidahkaidah (hukum) Islam dapat menjamin kelangsungan penyelenggaraan negara secara adil dan sejahtera. Untuk mengimplementasikan semua itu tidak harus misalnya dengan menerapkan aturan-aturan pidana Islam di Indonesia ataupun bahkan dengan mengubah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi Negara Islam, namun yang terpenting bahwa hukum Islam harus dapat menjiwai dan menjadi pondasi utama bagi struktur hukum nasional. Oleh karena itu, hukum Islam tidak hanya dapat hidup berdampingan dengan hukum nasional, namun hukum Islam juga dapat berperan sebagai pondasi utama dan melengkapi kekurangan-kekurangan hukum nasional.

Perkembangan hukum Islam di Indonesia memiliki peluang yang sangat cerah dalam pembangunan hukum nasional karena secara sosio antropologis dan emosional, hukum Islam sangat dekat dengan masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Selain itu secara historis hukum Islam telah dikenal jauh sebelum penjajah masuk ke Indonesia. Peluang bagi masa depan hukum Islam di Indonesia juga terbuka karena telah banyak aturan dalam hukum Islam yang disahkan menjadi hukum nasional dan hal ini memperlihatkan bagaimana *political will* pemerintah yang memberikan respon dan peluang yang baik bagi hukum Islam. Dengan melihat realitas kedekatan, kompleksitas materi hukum Islam pada masa datang, peluang hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional akan lebih luas lagi. Demikian juga peran akademisi yang melakukan pengembangan dan penelitian yang konstruktif dapat menunjang



perkembangan hukum Islam di Indonesia. Yang tidak kalah pentingnya adalah peran para ulama, kyai yang secara ikhlas mengajarkan dan tetap menyiarkan materi-materi hukum Islam kepada para santri serta jamaahnya yang tersebar diberbagai pelosok tanah air. Semua itu secara alami akan tetap menjaga keberadaan hukum Islam di Indonesia.

Untuk mewujudkan hukum Islam sebagai hukum nasional bagi bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa dengan kebudayaan dan agama yang berbeda ditambah lagi dengan keanekaragaman hukum yang ditinggalkan oleh penguasa kolonial dahulu bukanlah pekerjaan yang mudah. Dengan ide positivisasi hukum Islam selalu muncul kekhawatiran terjadinya benturan berbagai sistem hukum yang mendasari hukum positif di Indonesia. Koridor penting yang harus ditaati untuk menghindari perbenturan hukum agama dan hukum nasional menurut Mahfud MD adalah bahwa dalam bidang hukum, negara Pancasila menggariskan empat kaedah penuntun hukum nasional. Pertama, hukum-hukum di Indonesia harus menjamin integrasi atau keutuhan bangsa dan karenanya tidak boleh ada hukum yang diskriminatif berdasarkan ikatan yang primordial. Maksud substantif dari penuntun ini adalah bahwa hukum nasional harus menjaga keutuhan bangsa dan negara, baik secara teritori maupun ideologi. Kedua, hukum harus diciptakan secara demokratis dan nomokratis berdasarkan hikmah kebijaksanaan pembuatannya harus menyerap dan melibatkan aspirasi rakyat dan dilakukan dengan cara-cara yang secara hukum atau prosedural dan fair. Pembuatan dan penegakannya tidak cukup hanya dengan menggunakan demokrasi yang didasarkan pada suara terbanyak tetapi juga harus sesuai dengan



falsafah atau *rechtsidee* yang mendasarinya. Ketiga, hukum harus mendorong terciptanya keadilan sosial yang antara lain ditandai dengan upaya untuk mempersempit jurang kesenjangan antara yang kuat dan yang lemah atau antara yang kaya dan yang miskin dengan proteksi khusus oleh negara terhadap kelompok masyarakat yang lemah agar tidak dibiarkan bersaing secara bebas tapi tidak pernah seimbang dengan sekelompok kecil bagian masyarakat yang kuat. Keempat, tidak boleh ada hukum publik (mengikat komunitas yang ikatan primordialnya beragama) yang didasarkan pada ajaran agama tertentu sebab negara hukum Pancasila mengharuskan tampilnya hukum yang menjamin toleransi hidup beragama yang beradab.<sup>86</sup>

## **B. Implikasi yuridis dan Sosiologis dari Putusan MK NO 46 /PUU-VIII/2010**

### **Tentang Status Anak Di Luar Kawin**

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka dapat dilihat bahwa persepsi yang terbangun dalam pikiran para ulama di kota Pekanbaru tentang kedudukan hukum ayah biologis dengan anak luar nikah masih dipengaruhi oleh perspsi hukum Islam yang mereka pahami selama ini. Dalam persepsi mereka untuk menentukan hubungan kekerabatan berdasarkan pada petunjuk al-Quran sebagai dasar utama dalam hukum Islam. Kata nasab pada dasarnya berarti memberikan ciri-ciri dan menyebutkan keturunan mengandung pengertian kekerabatan di antara dua orang, dan pengertian ini berimplikasi bahwa hubungan keperdataan dalam hukum keluarga yang mencakup pernikahan hingga kewarisan hanya dapat terjadi akibat

---

<sup>86</sup> Moh. Mahfud MD, *Pengembangan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2008), h. 12.



hubungan kekerabatan. Persepsi mereka ini belum dipengaruhi adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan ayahnya.

Dengan demikian peneliti berupaya memberikan penjelasan tentang pokok perkara, dasar pertimbangan hukum serta diktum dari putusan MK tersebut. Setelah itu peneliti mencoba untuk mengetahui bagaimana implikasi dari penjelasan tersebut dalam hal untuk melihat persepsi para ulama tersebut tentang keberadaan putusan MK NO 46 /PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Di Luar Kawin tersebut. Selanjutnya dalam penelitian ini dilakukan penelaahan lebih lanjut tentang implikasi yuridis dan sosiologis putusan MK NO 46 /PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Di Luar Kawin dengan indikator sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel IV.8.**  
**Indikator Implikasi Yuridis Dan Sosiologis**  
**Putusan MK no. 46/PUU-VIII/2010**

Implikasi putusan MK NO 46 /PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Di Luar Kawin	1. Implikasi Yuridis	• Kesesuaian antara hukum Islam dan Putusan MK
		• Implikasinya terhadap kejelasan status keabsahan perkawinan
		• Harmonisasi dalam positivisasi hukum
	2. Implikasi Sosiologis	• Implikasi terhadap pergaulan bebas
		• Implikasi terhadap konflik rumah tangga
		• Implikasi terhadap keharmonisan masyarakat



Berdasarkan variable, indikator dan pertanyaan kunci di atas, pertanyaan pertama yang diajukan adalah apakah responden setuju dengan norma hukum yuridis yang diatur dalam Putusan MK tersebut. Jawaban responden dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel IV.9**

**Persepsi responden tentang kesesuaian putusan MK dengan Hukum Islam**

No	Jawaban Responden	Jumlah	Rasio (%)
1	Sangat Sesuai	0	0
2	Sesuai	0	0
3	Tidak Sesuai	62	88,57
4	Sangat Tidak Sesuai	8	11,43
<b>J U M L A H</b>			<b>100 %</b>

Sumber: Data Olahan

Dalam tabel di atas, dapat dilihat para responden pada umumnya (88,57%) adalah mengatakan bahwa putusan MK tersebut tidak sesuai dengan norma hukum yang diatur dalam Hukum Islam. Menurut salah seorang responden putusan Mahkamah Konstitusi ini berakibat pada pergeseran pengertian serta maksud dan tujuan hukum Islam itu sendiri. Dengan adanya pengakuan ayahnya terhadap anak di luar nikah maka anak tersebut dapat menggunakan nama keluarga ayahnya. Meskipun Anak luar kawin dapat diakui selain dengan cara pengakuan anak tetapi pengesahan anak luar kawin adalah suatu upaya hukum

untuk memberikan suatu kedudukan (status) sebagai anak sah melalui perkawinan yang dilakukan oleh orang tuanya.<sup>87</sup>

Namun demikian responden yang lain memberikan pandangannya bahwa pengakuan anak terhadap anak di luar nikah merupakan upaya adanya hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya dimana pengakuan anak harus ada kesukarelaan dari ayah atau bapaknya untuk mengakuinya dan persetujuan dari ibunya. Berbeda halnya dalam putusan MK ini, tidak memerlukan kesukarelaan dari ayahnya ataupun persetujuan ibunya melainkan si anak lah yang harus berusaha untuk membuktikan dengan ilmu pengetahuan atau secara biologis terhadap ayahnya. Setiap anak mempunyai hak mendapatkan perlindungan akan segala hal, termasuk di dalamnya hak mendapatkan identitas diri. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk menjaga perkembangan kejiwaan anak, tanpa menghiraukan bagaimana proses ia dilahirkan, akta kelahiran sangat dibutuhkan bagi seorang anak baik untuk kepentingan sekolah atau yang lainnya.<sup>88</sup>

Berdasarkan pandangan para responden diatas terlihat bahwa responden mengakui adanya pergeseran dan perubahan hukum sebagai implikasi dari keberadaan Putusan MK tersebut. Hal ini terutama terkait dengan kejelasan dan kebasahan pernikahan. Terkait dengan hal ini jawaban responden dapat dilihat dalam tabel berikut:

<sup>87</sup> Miftahuddin, M.Pd.I., Tokoh Agama kecamatan lima puluh, Wawancara, Pekanbaru, Oktober 2015

<sup>88</sup> Ahmad Romadhon, S.Ag., Tokoh Agama kecamatan rumbai, Wawancara, Pekanbaru, Oktober 2015



**Tabel IV.10.**  
**Tanggapan Responden mengenai Implikasi Putusan MK terhadap kejelasan status keabsahan perkawinan akibat perkawinan tidak dicatatkan**

No	Jawaban Responden	Jumlah	Rasio (%)
1	Sah meski tidak dicatatkan	0	0
2	Sah apabila dicatatkan meskipun setelah kelahiran anak luar nikah	28,57	28,57
3	Tidak sah meskipun dicatatkan setelah kelahiran anak luar nikah	68,57	68,57
4	Tidak sah meskipun bukan anak luar nikah tapi tidak dicatatkan	2,857	2,857
<b>J U M L A H</b>		<b>70</b>	<b>100 %</b>

Sumber: Data Olahan

Dalam tabel di atas, dapat dilihat para responden pada umumnya (68,57%) menyatakan bahwa pernikahan apabila dilakukan dengan sebab didahului oleh perzinahan yang menghasilkan anak luar nikah maka perkawinan tersebut tetap tidak sah meskipun tidak dicatatkan. Memang Putusan MK tidak menyinggung soal apakah kelahiran anak zina mempengaruhi keabsahan pernikahan yang tidak dicatatkan namun secara umum putusan MK ini mengakui keberadaan perkawinan meski tidak dicatatkan bila dapat dilakukan pembuktian keabsahan seorang anak. Hal ini kemudian berimplikasi pada upaya memberi akta kelahiran untuk anak di luar nikah, adalah untuk menghormati kepentingan dan hak seorang anak. Pertimbangan tersebut diambil dengan alasan terlepas dari soal prosedur / administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapat perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar



kehendaknya.<sup>89</sup> Menurut responden lainnya apabila di dalam akta kelahiran anak dicantumkan ada kata-kata anak di luar nikah yang sah atau kata-kata yang dipersamakan dengan hal tersebut maka dapat berdampak pada psikologis anak. Pada saatnya nanti ketika anak-anak menjalani masa sekolah, berinteraksi dengan temannya maka dapat saja anak di luar nikah ini diejek oleh temannya.<sup>90</sup>

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini maka apabila anak di luar nikah ini terbukti melalui ilmu pengetahuan bahwa merupakan anak pewaris maka anak tersebut mempunyai hak waris. Namun hak waris yang diberikan kepada anak di luar nikah besarnya tidak sama dengan anak dari perkawinan yang sah seperti halnya yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dimana anak luar nikah yang sah hanya mempunyai hak waris maksimal sepertiga dari bagian anak sah. Hal ini juga demi rasa keadilan bagi anak sah walaupun dirasa kurang memihak pada anak di luar nikah.

Implikasi dari adanya putusan MK tersebut ialah pengadilan dapat kebanjiran putusan MK tersebut baik pengadilan agama bagi penganut agama Islam mengenai anak luar kawin untuk memperoleh hak waris setelah bapaknya ditetapkan sebagai ayah biologisnya lewat sidang permohonan penetapan pengesahan asal-usul anak. Namun hubungan hukum ini belum menjawab mengenai kepastian timbulnya hak-hak keperdataan baru akibat dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

---

<sup>89</sup> Afriadi, S.ag., Tokoh Agama kecamatan Rumbai Pesisir, Wawancara, Pekanbaru, Oktober 2015

<sup>90</sup> Ust. Nurma Yunita., Tokoh Agama kecamatan Bukit Raya, Wawancara, Pekanbaru, Oktober 2015



Menurut pandangan responden lainnya anak-anak luar nikah memperoleh status anak sah, tidak hanya terhadap orang tuanya melainkan keabsahan itu berpengaruh terhadap sanak keluarga orang tua itu. Dalam Undang-Undang tidak ditentukan, mulai kapan pengesahan itu berlaku. Dapat dianggap, bahwa pengesahan itu dan akibat-akibatnya mulai berlaku sejak orang tua si anak melangsungkan perkawinan.<sup>91</sup>

Implikasi yuridis lainnya yang akan muncul akibat putusan MK ini adalah harmonisasi dengan berbagai ketentuan hukum perundang-undangan. Terkait hal ini dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel IV.11.**  
**Tanggapan Responden Tentang Implikasi Putusan MK terhadap**  
**Harmonisasi positivisasi hukum**

No	Jawaban Responden	Jumlah	Rasio (%)
1	Putusan MK bertentangan dengan UU kependudukan	70	100
2	Putusan MK bertentangan dengan UU Peradilan Agama	70	100
3	Putusan MK bertentangan dengan UU tentang perkawinan	70	100
4	Putusan MK bertentangan dengan UU Perdata	70	100

Sumber: Data Olahan

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat seluruh responden memandang ketidak harmonisan hukum bila Putusan MK ini diterapkan. Dengan demikian hal ini menurut seorang responden akan berpengaruh pada administrasi

<sup>91</sup> M. Arifin, MA., Tokoh Agama kecamatan Marpoyan Damai, Wawancara, Pekanbaru, Oktober 2015

kependudukan anak di luar nikah tersebut. Di Indonesia, administrasi kependudukan dimana ayah anak di luar nikah selama si anak dapat membuktikan dengan ilmu pengetahuan atau secara biologis maka akan masuk ke dalam administrasi kependudukan yang berarti ayah si anak di luar nikah akan tercatat didalam akta kelahiran dan identitas dari anak diluar nikah tersebut. Adanya pencatatan sipil ini dapat menjamin kepastian hukum bagi si anak sehingga keadilan bagi si anak untuk mendapatkan hak-hak sebagai anak dapat diakui.<sup>92</sup>

Hilangnya hubungan perdata sang anak dengan ayah biologisnya berakibat pada tidak adanya hak-hak keperdataan lainnya seperti hak nafkah dan hak waris. Hal ini bisa berdampak pada dua kondisi kelahiran anak.<sup>93</sup> Pertama, anak yang dilahirkan tanpa perkawinan, kedua, anak yang dilahirkan di dalam perkawinan sirri. Namun di sisi lain ada juga responden yang berpandangan bahwa dengan adanya norma baru ini MK selaras dengan UU Perlindungan Anak yang mewajibkan negara dan pemerintah untuk menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua. Ditambahkan lagi oleh responden lainnya bahwa Seorang ayah tidak dapat lagi lepas dari tanggung jawab keperdataannya dari sang anak meskipun anak tersebut lahir tanpa adanya perkawinan sah antara ayah dan ibunya. Hak anak dalam kondisi apapun tidak dapat dikurangi karena hak anak adalah bagian dari hak

---

<sup>92</sup> Sabri Husein, M.Ag., Tokoh Agama kecamatan Tenayan Raya, Wawancara, Pekanbaru, Oktober 2015

<sup>93</sup> Drs. Ahmad Yani., Tokoh Agama kecamatan Tampan, Wawancara, Pekanbaru, Oktober 2015



asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (12) UU Perlindungan Anak.<sup>94</sup>

Secara sosiologis implikasi yang paling dikhawatirkan dengan adanya putusan MK ini adalah menambah besar potensi berkembangnya pergaulan bebas. Fenomena pergaulan bebas dimasyarakat saat ini sangat memprihatinkan, terutama pada kaum remaja. Pergaulan bebas yang identik dengan dunia gemerlap, pemakaian narkoba & seks bebas sudah menjadi hal yang biasa terjadi dimasyarakat. Dikalangan remaja menganggap hubungan antar lawan jenis tanpa pembatas (yang disebut dengan pacaran) sebagai hal yang biasa. Akibatnya saat ini banyak kita dengar berita dimedia kasus tentang kehamilan diluar nikah, pemerkosaan, aborsi dan tingginya angka penderita HIV/AIDS. Penyebab akan maraknya pergaulan bebas dimasyarakat, khususnya kaum remaja saat ini diantaranya faktor lingkungan seperti keluarga/orang tua, teman dan masyarakat dimana adanya kecenderungan anak untuk mencari perhatian dengan melakukan hal yang terlarang, atau ketidakpedulian orang tua terhadap pergaulan anak remaja, mereka menganggap masalah pergaulan adalah masalah anak muda, serta kesenjangan social dimasyarakat bahwa banyak para remaja sekarang menganggap orang tua mereka ketinggalan jaman dalam urusan anak muda sehingga mereka cenderung untuk meninggalkan orang tua dan menentukan pilihannya sendiri bagaimana mereka akan bergaul. Terkait dengan hal ini dalam penelitian ini diuraikan persepsi responden tentang potensi pergaulan bebas

---

<sup>94</sup> Syukron Al-Hadi, S.Ag., Tokoh Agama kecamatan Payung Sekaki, Wawancara, Pekanbaru, Oktober 2015

sebagai implikasi dari putusan MK ini sebagaimana dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel IV.12.**  
**Tanggapan Responden Tentang Implikasi Putusan MK**  
**terhadap pergaulan bebas**

No	Jawaban Responden	Jumlah	Rasio (%)
1	Sangat potensial	60	85,71
2	Cukup potensial	10	14,29
3	Kurang potensial	0	0
4	Tidak potensial	0	0
<b>J U M L A H</b>		<b>70</b>	<b>100 %</b>

Sumber: Data Olahan

Dalam tabel di atas, dapat dilihat para responden pada umumnya (85,71%) responden menyatakan adanya potensi yang sangat jelas akan munculnya pergaulan bebas akibat dari putusan MK ini. Apalagi ditambahkan seorang responden kurangnya pemahaman agama dan lemahnya iman Agama dan keimanan merupakan landasan hidup seorang individu yang dapat membentuk keribadian seseorang. Dengan agama seseorang dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak. Tetapi sebaliknya bagi orang yang kurang pengetahuannya tentang agama dan lemahnya iman yang tertanam dalam diri dan pikiran seseorang, maka akan mendorong untuk cenderung melakukan hal-hal



yang negative yang bertentangan dengan syariat islam.<sup>95</sup> Demikian juga faktor perubahan zaman, dimana pada era globalisasi saat ini, akibat dari kemajuan system komunikasi, pengaruh media masa dan serangan peradapan barat di negeri kaum muslim akibatnya menjadikan taraf berpikir umat merosot, lunturnya keimanan individu.<sup>96</sup>

Dengan demikian, solusi bagi pencegahan pergaulan bebas adalah dengan menerapkan hukum-hukum pergaulan Islam dan menjaganya dengan penerapan sistem Islam. Sebagai implikasi lebih lanjut dari pergaulan bebas yang tidak diwarnai dengan ajaran Islam akan mengakibatkan pada harmonisasi hubungan dalam sebuah keluarga. Dengan demikian implikasi social berikutnya akan terlihat dalam keharmonisan rumah tangga. Sebagai akibat dari putusan MK ini para responden melihat sebagai berikut:

**Tabel IV.13.**  
**Tanggapan Respon terhadap Implikasi Putusan MK terhadap konflik rumah tangga**

No	Jawaban Responden	Jumlah	Rasio (%)
1	Sangat berpengaruh pada ketidak harmonisan rumah tangga	58	82,86
2	Cukup berpengaruh pada ketidak harmonisan rumah tangga	12	17,14
3	Kurang berpengaruh pada ketidak harmonisan rumah tangga	0	0
4	Tidak berpengaruh pada ketidak harmonisan rumah tangga	0	0
<b>J U M L A H</b>		<b>71</b>	<b>100 %</b>

<sup>95</sup> Suyono., Tokoh Agama kecamatan Rumbai Pesisir, Wawancara, Pekanbaru, Oktober 2015

<sup>96</sup> Drs. H. Ahmad Jasman., Tokoh Agama kecamatan Bukit Raya, Wawancara, Pekanbaru, Oktober 2015

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa 82,86 responden menyatakan bahwa putusan MK tersebut akan berpengaruh dalam kehidupan rumah tangga. Menurut salah seorang responden kebahagiaan hidup sebuah keluarga banyak bergantung kepada persefahaman di dalam menjalin perhubungan suami isteri. Kegagalan mereka untuk berbuat demikian akan melahirkan ketegangan dan konflik. Oleh itu tidak mustahil jika dikatakan bahwa awal pembentukan rumah tangga merupakan kunci terciptanya krisis di dalam sebuah rumahtangga walau bagaimana harmoni kehidupan rumahtangga tersebut.<sup>97</sup>

Pernikahan yang tidak dicatatkan juga merupakan pangkal dari ketegangan emosi yang selalu menimbulkan ketegangan dalam perhubungan keluarga. Pertengkaran yang sengit kerap terjadi. Mereka akan bergaduh asal saja bersua muka. Suami isteri sering mencari-cari punca kemarahan pasangan dan segala ketidakpuasan hati diluahkan di samping kata-kata ungkitan. Kadangkala bila kemarahan memuncak akan melibatkan masalah keluarga, keturunan dan sebagainya.<sup>98</sup> Bahkan puncak krisis di antara suami isteri ialah masing-masing akan mengemukakan tuntutan perceraian melalui pengadilan atau perceraian yang juga tidak dicatatkan. Hal ini akan mengijilangkan hak dan tanggungjawab di dalam rumahtangga.<sup>99</sup>

---

<sup>97</sup> Safril BA., Tokoh Agama kecamatan Marpoyan Damai , Wawancara, Pekanbaru, Oktober 2015

<sup>98</sup> H. Abdul Shomad. BA., Tokoh Agama kecamatan Tenayan Raya, Wawancara, Pekanbaru, Oktober 2015

<sup>99</sup> Afrizal Ahmad, MA., Tokoh Agama kecamatan Tampar, Wawancara, Pekanbaru, Oktober 2015



Sebagai bagian terkecil dari masyarakat, ketidak harmonisan dalam keluarga menyebabkan ketidak harmonisan dalam masyarakat. Untuk itu para responden memberikan pandangan mereka terkait dengan implikasi putusan MK terhadap keharmonisan dalam masyarakat. Terkait dengan kondisi ini jawaban responden dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel IV.13.**

**Tanggapan Respon terhadap Implikasi Putusan MK terhadap keharmonisan masyarakat**

No	Interval	Jumlah	Rasio (%)
1	Sangat berpengaruh pada ketidak harmonisan masyarakat	58	82,86
2	Cukup berpengaruh pada ketidak harmonisan masyarakat	12	17,14
3	Kurang berpengaruh pada ketidak harmonisan masyarakat	0	0
4	Tidak berpengaruh pada ketidak harmonisan masyarakat	0	0
<b>J U M L A H</b>		<b>70</b>	<b>100 %</b>

Sumber: Data Olahan

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa 82,86 responden menyatakan bahwa putusan MK tersebut akan berpengaruh dalam keharmonisan bermasyarakat. Menurut salah seorang responden kedudukan anak biologis sangat menentukan bagaimana perilaku sosial dalam masyarakat. Anak biologis yang lahir melalui akad nikah yang sah akan mendapatkan posisi yang lebih baik dari masyarakat. Hal ini akan menjadi pangkal kemaslahatan hidup bermasyarakat karena jika perkawinan itu tidak dicatatkan akan terjadi kekacauan dan

kemadaratan yang akan menimpa umat manusia, karena kemungkinan besar perkawinan itu tidak akan terkontrol, banyak orang kawin cerai-kawin cerai, atau telah berkali-kali menikah akan mengaku belum pernah menikah, yang pada akhirnya mengakibatkan kemadaratan yang amat besar bagi anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan, serta tidak diketahui siapa ayah kandung yang sebenarnya, karena tidak akan bisa diingat lagi siapa yang sudah menikah dan yang belum menikah, tetapi kalau dicatatkan akan diketahui pernikahan seseorang dan akan terkontrol serta dapat diketahui pula nama orang tua seseorang.<sup>100</sup>

---

<sup>100</sup> H. M. Amin, S.Ag., Tokoh Agama kecamatan Sukajadi, Wawancara, Pekanbaru, Oktober 2015



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Para ulama di Pekanbaru masih belum menyadari adanya putusan MK yang merubah hubungan hukum antara ayah dan anak biologis. Dalam paradigm para ulama keabsahan pernikahan didasarkan pada norma yang diatur dalam hukum Islam. Salah satu akibat dari perkawinan yang tidak sah, anak yang dilahirkan tidak memiliki hubungan keperdataan secara sempurna dengan kedua orang tuanya. Hubungan keperdataan yang dimaksud meliputi hak nasab (garis keturunan) anak dihubungkan kepada ayah (dalam Islam), hak pemenuhan nafkah dari orang tua terhadap anak, hak pemeliharaan dan pendidikan (hadhanah), hak saling mewarisi, hak perwalian nikah bagi ayah atas anak perempuan, dan hak-hak keperdataan lainnya. Namun Mahkamah Konstitusi menyimpulkan bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Namun demikian penetapan anak biologis berdasarkan pencatatan pernikahan dimana menurut hukum Islam baik sebagaimana yang diatur dalam KHI dan juga UU perkawinan tidak mengakui keabsahan perkawinan yang tidak dicatatkan, namun dalam keputusan MK diakui berdasarkan pembuktian dan putusan pengadilan. Dalam hal ini perbedaan keduanya

terletak dalam kesempatan adanya upaya hukum yang disediakan melalui putusan MK untuk melakukan upaya hukum terhadap penetapan nasab anak dalam pernikahan yang tidak dicatatkan. Pencabutan dan pembebasan kekuasaan orang tua diperlukan keputusan hakim dimana hakim dapat mencabut kekuasaan dari tiap-tiap orang tua atas salah seorang atau semua anaknya. Gugurnya kedudukan ayah biologis dengan adanya kelahiran anak di luar pernikahan sebagaimana yang diatur dalam hukum Islam, berbeda dengan yang diatur dalam putusan MK ini. Seorang ayah biologis tetap memiliki kekuasaan hukum atas anaknya selama tidak dicabut oleh pengadilan.

2. Implikasi dari putusan MK ini dapat dilihat secara yuridis maupun sosiologis. Secara yuridis putusan MK ini akan memberikan implikasi berupa ketidaksesuaian antara hukum Islam dan Putusan MK sehingga akan menjadi kontraproduktif dengan upaya positivisasi hukum Islam. Demikian juga secara yuridis putusan MK akan berimplikasi pada asas kepastian hukum tentang kejelasan status keabsahan perkawinan serta harmonisasi dalam positivisasi hukum dimana ada kecenderungan akan berbenturan dengan UU peradilan agama, UU perkawinan dan UU tentang kependudukan. Sementara dalam perspektif sosiologis putusan MK ini akan berimplikasi pada munculnya pergaulan bebas, konflik rumah tangga serta ketidakharmonisan dalam masyarakat



## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dalam tulisan ini memberikan saran agar para akademisi, praktisi, legislator maupun masyarakat Indonesia sebagai masyarakat hukum mampu berperan berfikir secara integral dalam memahami upaya Penegakan Hukum Islam, baik dalam skala lokal maupun global. Yang lebih penting lagi, yaitu intensitas pemahaman yang mendalam atas situasi sosio kultur yang berada di dalam lingkungannya. Disamping itu juga peradilan terutama Hakim Pengadilan Agama juga dituntut untuk mampu berpikir realistis dengan tidak mengabaikan kerangka ideal dan tujuan umum dari upaya Penegakan Hukum Islam.

Oleh karena itu, dibutuhkan suatu jalur pikiran yang mampu menjembatani aspek ideal dan aspek praktis, karena upaya Penegakan Hukum Islam bersifat praktis, yaitu yang diilhami oleh kerangka ideal, dan bergerak menurut garis rencana serta program sebagai jembatannya, maka jembatan yang tepat adalah beranjak dari realitas. Paska putusan MK tentang uji materil UU perkawinan hendaknya dipandang tidak hanya dari sisi fiqh klasik saja, tetapi penerapan prinsip-prinsip umum dari hukum Islam yang penuh dengan nilai keadilan dan tanggung jawab menjadi sandaran dalam memeriksa dan menjatuhkan putusan hukum.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 1994)
- Abu Zahrah, *al-Ahwal al-Syakhsiyyah*. (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabiyy, 2005)
- Abdul Ghofur Anshori dan Yulkarnain Harahab, *Hukum Islam Dinamika Dan Perkembangannya Di Indonesia*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008)
- Ahmad Jamaludin, *Nasab: antara hubungan darah dan hukum Serta implikasinya terhadap kewarisan*, sebagaimana dimuat dalam jurnal Ishraqi, Vol. 10, Nomor 1, Juni 2012
- Ahmad Roflik, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995)
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)
- Amir Syarifuddin, Prof. Dr, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*, (Padang : Angkasa raya, 1993)
- Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (cet-2; Jakarta: Balai Pustaka, 1988)
- A. Qodri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional (Kompetisi Antara Hukum Islam Dan Hukum Umum)*, (Yogyakarta: Gama Media Offset, 2004), h. 173
- Audah, Abd Al-Qadir, *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamy*, Juz II, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Arabi, t.th.)
- Buthi, Muhammad Sa'id Ramadan, *Dawabith al-Mashlahah fi al-Syari'ah al-Islamiyah* (Damaskus: al-Umawiyah, 1967)
- Departemen Agama RI., *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1987)
- Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: 2001.
- Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: DEPAG RI, 1990)
- DY. Witanto, *Hukum Keluarga; Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materil UU Perkawinan* (Jakarta: 2012, Prestasi Pustaka)
- Fatmawati, *Hak Menguji (Toetsingsrechts) yang Dimiliki Hakim dalam Sistem Hukum di Indoneisa* (Jakarta: Rajawali Pers, 2005)
- Ghazali, Abu Hamid, *al-Mustasfa*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993)
- H. M. Zuffran Sabrie, *Analisa Hukum Islam Tentang Anak Luar Nikah*. (Jakarta : Departemen Agama RI, 1998)
- Hafidz Abdurrahman, *Islam Pilitik dan Spritual*, (Singapore : Lisan Ul-Haq, 1998)
- Ibn Arabiy, *Ahkam al-Quran*, jilid I, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.)
- Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, (Kairo: Maktabah wa Mathba'ah al Musyhid, 1969)
- Jashshash, *Ahkam al-Quran*, jilid I, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993)
- Louis Ma'luf, *al-Munjid*, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986)
- M. Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998)



- M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986)
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, jilid XV (, Jakarta, Lentera Hati, 2004)
- M. Thahir Maloko, *Anak Sah dan Anak Luar Nikah* dalam jurnal Al-Risalah, Volume 10 Nomor 1 Mei 2010
- Mahmud Syaltut, *al Fatawa*, (Kairo: Daar al Qalam, tth)
- Marbawy, Muhammad Idris., *Kamus Marbawy.*, (Kairo: Mustafa al-Baby al-Haby, 1350 H)
- Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006)
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999)
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh lima mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2007)
- Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2012)
- Prianter Jaya Hairi, *Status Keperdataan Anak Diluar Nikah Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*, Jakarta: Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, dalam Jurnal Info Singkat Hukum Vol. IV, Nomor 06/II/P3DI/Maret/2012
- Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010
- Qurthubiy, *al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Fikr, tth.)
- R. Soetojo prawirohamidjojo dan Asis Safioeden. *Hukum orang dan keluarga*. (Bandung: 1986, Alumni)
- R. Soebekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Cet. XVII; Jakarta: Intermasa, 1987)
- Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Edisi Baru (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006)
- Ronny Soemitro. *Studi Hukum Dalam Masyarakat*. (Bandung: Alumni, 1985 )
- Said Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid III, (Beirut: Dar al-Kutub al-Arabiy, T.th)
- Satria Effendi, *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (cet-2, Kencana, Jakarta, 2004)
- Shan'any., *Subulussalam.*, jilid III, ( Bandung: Maktabah al-Dakhlan, , tth)
- Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999)
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* , (Yogyakarta: Liberty, 1996)
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Jakarta : Attahiriyah, 1993)
- Thabary, Abu Ja'far Muhammad Jarir, *Tafsir at-Thabary*, juz 1, (Beirut: Dar al-Ilmi, 1420 H)
- Tom Campbell. *Tujuh Teori Social : Sketsa Penilaian Dan Perbandingan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1994)
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak.
- Zuhailiy, Wahbah, *fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1984)
- , *Tafsir al-Munir*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1991)

# LAMPIRAN-LAMPIRAN

MENGASI

DIAT AN PERSEKUTUAN

DIAT AN PERSEKUTUAN

DIAT AN PERSEKUTUAN

DIAT AN PERSEKUTUAN

DIAT AN PERSEKUTUAN

DIAT AN PERSEKUTUAN

7





# PEMERINTAH PROPINSI RIAU BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jendral Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU

Kode Pos : 28126

## REKOMENDASI

Nomor : 503/BP2T-IR/2015/8528

TENTANG

### PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN

Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Penelitian dari Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Suska Riau, Nomor : Un-04/L/ITL.01/441/2015 Tanggal 8 Agustus 2015, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : ZULFAHMI BUSTAMI, M.AG
2. Alamat : PEKANBARU
3. Pekerjaan : DOSEN
4. Kebangsaan : INDONESIA
5. Judul Penelitian : STUDI ANALISA PERSEPSI ULAMA DI PEKANBARU TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU-VIII/2010 TENTANG STATUS ANAK DI LUAR KAWIN
6. Lokasi Penelitian :
  1. MAJELIS ULAMA INDONESIA RIAU
  2. PENGADILAN TINGGI AGAMA
  3. MAJELIS ULAMA INDONESIA KOTA PEKANBARU
  4. PENGADILAN AGAMA PEKANBARU
7. Penanggung Jawab : ZULFAHMI BUSTAMI, M.Ag
8. Pengikut :
  1. WAHIDIN, M.AG
  2. SABRI FAZIL

dengan ketentuan sebagai berikut:

Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan ini.

Pelaksanaan Kegiatan Penelitian ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian Rekomendasi ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini dan terima kasih.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 20 Oktober 2015

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
PROVINSI RIAU



EVAREFITA, SE, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19720628 199703 2 004

Penyampaian :

Penyampaian Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Riau di Pekanbaru
- Ketua Pengadilan Tinggi di Pekanbaru
- Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Pekanbaru
- Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru
- Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan





**SURAT KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
Nomor: 1164 /R/2015**

**Tentang  
PENETAPAN PENELITIAN KOMPETITIF  
PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
TAHUN ANGGARAN 2015**

**REKTOR UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka untuk kelancaran pelaksanaan Penelitian Kompetitif pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2015, maka dipandang perlu menetapkan Peneliti Penelitian Kompetitif berdasarkan SK Rektor;
  - b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas tersebut;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor tentang penunjukan sebagai peneliti pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2015

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2005 tentang perubahan IAIN Susqa menjadi UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
  6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 9 Tahun 2013 jo. Peraturan Perubahan Menteri Agama RI Nomor 74 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
  7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
  8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 77/KMK.05/2009 tentang Penetapan UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menetapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU);
  9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor; B.II/3/13874 tanggal 18 Juni 2014, tentang Pengangkatan Rektor UIN Sulthan Syarif Kasim Riau masa bakti 2014-2018;
  10. Surat Pengesahan DIPA Badan Layanan Umum UIN Sultan Syarif Kasim Riau Petikan Tahun Anggaran 2015 Nomor SP DIPA-025.04.2.424157/2015 Tanggal 14 Nopember 2014

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :** **SURAT KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN PENELITI PENELITIAN KOMPETITIF PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU TAHUN ANGGARAN 2015**



- Pertama** : Menetapkan Peneliti Penelitian Kompetitif pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Sultan Syarif Kasim Riau tahun anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- Kedua** : Tugas Peneliti adalah:
1. Melakukan penelitian dengan baik
  2. Melakukan kegiatan turun ke lapangan, perpustakaan dan atau ke laboratorium
  3. Menyusun draf penelitian dan membuat ringkasan hasil penelitian
  4. Mengikuti seminar hasil penelitian
  5. Menyusun laporan hasil penelitian
  6. Menyusun laporan penggunaan dana penelitian
  7. Mempublikasikan hasil penelitian
  8. Melaporkan hasil kegiatan kepada Rektor
- Ketiga** : Biaya pelaksanaan dibebankan kepada DIPA BLU UIN Sultan Syarif Kasim Riau tahun anggaran 2015 DIPA-025.04.2.424157/2015 Tanggal 14 Nopember 2014 besaran dana perjudul terlampir.
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal 1 Mei s/d 31 Desember 2015.
- Kelima** : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

KUTIPAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Sultan Syarif Kasim Riau untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru

Pada Tanggal : 26 Juni 2015



PROF. DR. H. MUNZIR HITAMI, MA

NIP. 195404221986081002

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Agama Islam Kementerian Agama RI Jakarta;
4. Wakil Rektor di Lingkungan UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
5. Dekan dan Direktur di Lingkungan UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
6. Ketua Lembaga dan Kepala Pusat UPT di lingkungan UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
7. Kepala Biro di lingkungan UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pekanbaru;
9. Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
10. Bendaharawan Pengeluaran DIPA BLU UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

LAMPIRAN: SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
Nomor : 1164 /R/2015  
Tanggal : 26 Juni 2015

KLASTER PENELITIAN KOMPETITIF  
LPPM UIN SUSKA TAHUN 2015

NO	PENELITI UTAMA	ANGGOTA	TIM PENUNJANG	JUDUL	LOKASI	NILAI
1	Ade Jamaruddin, M.Ag	Arif Marsal, Lc, MA (197608282009011011)	-	ISBAT RAMADHAN DAN 1 SYAWAL DALAM PANDANGAN AL-QUR'AN	Kantor PENGURUS PUSAT PERSIS dan BOSCA LEMBANG	512
2	Adynata, M.Ag	Idris, M.Ed (197605042005011005)	Dariyusman, S.Kom (1980120520110110 01)	Pengaruh Ruyyah Syar'iyah dalam Pengobatan Penyakit Fisik di Propinsi Riau	Propinsi Riau	552
3	Afrizal Nur, Dr., S.Th.I. MIS	Jani Arni, S.Th.I, M.Ag (198201172009122006) Rahmad Kurniawan, ST O	-	Sistem Pakar Tafsir Maudhu'i Corak Al- Adabiy Ijtima'iy Menggunakan Metode Bayesian Network	Selat Panjang, Kab. Meranti, Riau, Indonesia	589
4	Afrizal M. Prof. Dr., MA	Drs. Jamaluddin, MUs (196704231993031004) Dr. Abd. Wahid, MUs (195801091993031001)	-	METODE PEMBELAJARAN FILSAFAT ISLAM PADA PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM DI SELURUH INDONESIA	Indonesia	532



NO	PENELITI UTAMA	ANGGOTA	TIM PENUNJANG	JUDUL	LOKASI	NILAI
62	Zikri Darussamin, Prof. Dr., M.Ag	Haris Riadi, M.Ag (197208221997031004)	jaslizar.se (130012027)	PEMBAGIAN WARISAN DAN HARTA GONOGINI BAGI ISTRI YANG IKUT MENANGGUNG BEBAN EKONOMI KELUARGA PADA MASYARAKAT LIMA KOTO KAMPAR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	LIMA KOTO KAMPAR	515
63	Zulfahmi, M.Ag	Wahidin, M.Ag (197101081997031003)	-	STUDI ANALISA TERHADAP PERSEPSI ULAMA DI PEKANBARU TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 46 /PUU-VIII/2010 TENTANG STATUS ANAK DI LUAR KAWIN	pekanbaru	515
64	Zulfahmi, S.Hut. M.Si	Ervina Aryanti (7649)	-	DIAGNOSIS MORFOLOGI DAN GENETIK PASAK BUMI JANTAN DAN PASAK BUMI BETINA DI HUTAN LARANGAN ADAT RUMBIO	Pekanbaru dan Kampar	579
65	Zulkayandri, Dr., M.Ag	Drs. Suhayib, M.Ag (196312311992031037)	-	PENGAMALAN SYARI'AT PENGIKUT THARIQAT NAQSABANDIAH DI BENTENG TUJUH LAPIS KECAMATAN TAMBUSAI TENGAH ROKAN HULU RIAU	Rokan Hulu	545





**PUTUSAN**  
**Nomor 46/PUU-VIII/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

**[1.2]** 1. Nama : **Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim**

Tempat dan Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 20 Maret 1970

Alamat : Jalan Camar VI Blok BL 12A, RT/RW 002/008, Desa/Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang, Banten

2. Nama : **Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono**

Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 5 Februari 1996

Alamat : Jalan Camar VI Blok BL 12A, RT/RW 002/008, Desa/Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang, Banten.

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 58/KH.M&M/K/VIII/2010 bertanggal 5 Agustus 2010, memberi kuasa kepada i) Rusdianto Matulatuwa; ii) Oktryan Makta; dan iii) Miftachul I.A.A., yaitu advokat pada Kantor Hukum Matulatuwa & Makta yang beralamat di Wisma Nugra Santana 14<sup>th</sup> Floor, Suite 1416, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 7-8 Jakarta 10220, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai \_\_\_\_\_ para Pemohon;



- [1.3]** Membaca permohonan dari para Pemohon;  
 Mendengar keterangan dari para Pemohon;  
 Memeriksa bukti-bukti dari para Pemohon;  
 Mendengar keterangan ahli dari para Pemohon;  
 Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pemerintah;  
 Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Dewan Perwakilan Rakyat;  
 Membaca kesimpulan tertulis dari para Pemohon;

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 14 Juni 2010 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 14 Juni 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 211/PAN.MK/2010 dan diregistrasi pada Rabu tanggal 23 Juni 2010 dengan Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Agustus 2010, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### **A. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) para Pemohon**

1. Bahwa Pemohon adalah Perorangan warga negara Indonesia;
2. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UUMK menyatakan:  
 Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
  - a. perorangan warga negara Indonesia;
  - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
  - c. badan hukum publik atau privat; atau
  - d. lembaga negara.

Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UUMK menyatakan:

Yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan demikian, Pemohon diklasifikasikan sebagai perorangan warga



negara Indonesia yang dirugikan hak konstitusionalnya disebabkan diperlakukan berbeda di muka hukum terhadap status hukum perkawinannya oleh undang-undang;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk permohonan uji materiil ini, yaitu apakah Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara permohonan uji materiil undang-undang ini? Syarat kesatu adalah kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Syarat kedua adalah bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang;
4. Bahwa telah dijelaskan terdahulu, Pemohon adalah warga negara Indonesia yang merupakan "Perorangan Warga Negara Indonesia", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Karenanya, Pemohon memiliki kualifikasi sebagai Pemohon dalam permohonan uji materiil ini;
5. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan:

"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", sehingga oleh karenanya pemikahan yang telah dilakukan oleh Pemohon adalah sah dan hal itu juga telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sebagaimana tercantum dalam amar Penetapan atas Perkara Nomor 46/Pdt.P/2008/PA.Tgrs., tanggal 18 Juni 2008, halaman ke-5, alinea ke-5 yang menyatakan:

"... Bahwa pada tanggal 20 Desember 1993, di Jakarta telah berlangsung pemikahan antara Pemohon (Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim) dengan seorang laki-laki bernama Drs. Moerdiono, dengan wali nikah almarhum H. Moctar Ibrahim, disaksikan oleh 2 orang saksi, masing-masing bernama almarhum KH. M. Yusuf Usman dan Risman, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, uang 2.000 Riyal (mata uang Arab), satu set perhiasan emas, berlian dibayar tunai dan dengan ijab yang diucapkan oleh wali tersebut dan qobul diucapkan oleh laki-laki bernama Drs. Moerdiono;



6. Bahwa Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan:

"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Dengan berlakunya Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan, maka hak-hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara Indonesia yang dijamin oleh Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah dirugikan;

Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

"Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah."

Ketentuan UUD 1945 ini melahirkan norma konstitusi bahwa Pemohon yang merupakan warga negara Indonesia memiliki hak yang setara dengan warga negara Indonesia lainnya dalam membentuk keluarga dan melaksanakan perkawinan tanpa dibedakan dan wajib diperlakukan sama di hadapan hukum;

Sedangkan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menyatakan:

"Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."

Ketentuan UUD 1945 ini jelas melahirkan norma konstitusi bahwa anak Pemohon juga memiliki hak atas status hukumnya dan diperlakukan sama di hadapan hukum.

Artinya, UUD 1945 mengedepankan norma hukum sebagai bentuk keadilan terhadap siapapun tanpa diskriminatif. Tetapi, UU Perkawinan berkata lain yang mengakibatkan Pemohon dirugikan hak konstitusionalnya. Secara konstitusional, siapapun berhak melaksanakan perkawinan sepanjang itu sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Dalam hal ini, Pemohon telah melaksanakan perkawinannya sesuai dengan norma agama yang dianutnya yaitu Islam, serta sesuai dengan rukun nikah sebagaimana diajarkan oleh Islam. Bagaimana mungkin norma agama diredusir oleh norma hukum sehingga perkawinan yang sah menjadi tidak sah. Akibat dari diredusirnya norma agama oleh norma hukum, tidak saja perkawinan Pemohon statusnya menjadi tidak jelas tetapi juga mengakibatkan keberadaan eksistensi



anaknya di muka hukum menjadi tidak sah;

7. Bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan:

"Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya."

Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, maka anak Pemohon hanya mempunyai hubungan keperdataan ke ibunya, dan hal yang sama juga dianut dalam Islam. Hanya saja hal ini menjadi tidak benar, jika norma hukum UU Perkawinan menyatakan seorang anak di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, karena berpijak pada sah atau tidaknya suatu perkawinan menurut norma hukum. Begitupun dalam Islam, perkawinan yang sah adalah berdasarkan ketentuan yang telah diatur berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, dalam hal ini, perkawinan Pemohon adalah sah dan sesuai rukun nikah serta norma agama sebagaimana diajarkan Islam. Perkawinan Pemohon bukanlah karena perbuatan zina atau setidaknya dianggap sebagai bentuk perzinahan. Begitu pula anaknya adalah anak yang sah. Dalam pandangan Islam hal yang berbeda dan sudah barang tentu sama dengan ketentuan dalam UU Perkawinan adalah menyangkut seorang wanita yang hamil dan tidak terikat dalam perkawinan maka nasib anaknya adalah dengan ibu dan keluarga ibunya. Jadi, pertanyaannya adalah bagaimana mungkin perkawinan yang sah menurut norma agama, tetapi norma hukum meredusimya menjadi tidak sah?

Dengan berlakunya Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, maka hak-hak konstitusional Pemohon selaku ibu dan anaknya untuk mendapatkan pengesahan atas pernikahannya serta status hukum anaknya yang dijamin oleh Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah dirugikan;

8. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Merujuk pada ketentuan UUD 1945 ini maka Pasal 2 ayat (2) dan Pasal



perkawinan dan status hukum anaknya yang dihasilkan dari hasil perkawinan;

12. Bahwa hak konstitusional Pemohon yang telah dilanggar dan merugikan tersebut adalah hak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) dan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Berdasarkan ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan (2) UUD 1945 tersebut, maka Pemohon dan anaknya memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan pengesahan atas pernikahan dan status hukum anaknya. Hak konstitusional yang dimiliki oleh Pemohon telah dicerai oleh norma hukum dalam UU Perkawinan. Norma hukum ini jelas tidak adil dan merugikan karena perkawinan Pemohon adalah sah dan sesuai dengan rukun nikah dalam Islam. Merujuk ke norma konstitusional yang termaktub dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 maka perkawinan Pemohon yang dilangsungkan sesuai dengan rukun nikah adalah sah tetapi terhalang oleh Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan. Norma hukum yang mengharuskan sebuah perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku telah mengakibatkan perkawinan yang sah dan sesuai dengan rukun nikah agama Islam (norma agama) menjadi tidak sah menurut norma hukum. Kemudian hal ini berdampak ke status anak yang dilahirkan Pemohon ikut tidak menjadi sah menurut norma hukum dalam UU Perkawinan. Jadi, jelas telah terjadi pelanggaran oleh norma hukum dalam UU Perkawinan terhadap perkawinan Pemohon (norma agama). Hal senada juga disampaikan oleh Van Kan: "Kalau pelaksanaan norma-norma hukum tersebut tidak mungkin dilakukan, maka tata hukum akan memaksakan hal lain, yang sedapat mungkin mendekati apa yang dituju norma-norma hukum yang bersangkutan atau menghapus akibat-akibat dari pelanggaran norma-norma hukum itu." (Van Kan, *Pengantar Ilmu Hukum* (terjemahan dari *Inleiding tot de Rechtswetenschap* oleh Mr. Moh. O. Masduki), PT. Pembangunan, Jkt, cet. III, 1960, hal. 9-11.)
13. Bahwa konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tersebut adalah setiap orang memiliki kedudukan dan hak yang sama termasuk haknya untuk mendapatkan pengesahan atas pernikahan dan status hukum anaknya. Norma konstitusi yang timbul dari Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) adalah adanya persamaan dan kesetaraan di hadapan hukum. Tidak ada



diskriminasi dalam penerapan norma hukum terhadap setiap orang dikarenakan cara pernikahan yang ditempuhnya berbeda dan anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut adalah sah di hadapan hukum serta tidak diperlakukan berbeda. Tetapi, dalam praktiknya justru norma agama telah diabaikan oleh kepentingan pemaksa yaitu norma hukum. Perkawinan Pemohon yang sudah sah berdasarkan rukun nikah dan norma agama Islam, menurut norma hukum menjadi tidak sah karena tidak tercatat menurut Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan. Akibatnya, pemberlakuan norma hukum ini berdampak terhadap status hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon menjadi anak di luar nikah berdasarkan ketentuan norma hukum dalam Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan. Di sisi lain, perlakuan diskriminatif ini sudah barang tentu menimbulkan permasalahan karena status seorang anak di muka hukum menjadi tidak jelas dan sah. Padahal, dalam UUD 1945 dinyatakan anak terlantar saja, yang status orang-tuanya tidak jelas, dipelihara oleh negara. Dan, hal yang berbeda diperlakukan terhadap anak Pemohon yang dihasilkan dari perkawinan yang sah, sesuai dengan rukun nikah dan norma agama justru dianggap tidak sah oleh UU Perkawinan. Konstitusi Republik Indonesia tidak menghendaki sesuatu yang sudah sesuai dengan norma agama justru dianggap melanggar hukum berdasarkan norma hukum. Bukankah hal ini merupakan pelanggaran oleh norma hukum terhadap norma agama;

14. Bahwa dalam kedudukannya sebagaimana diterangkan terdahulu, maka telah terbukti Pemohon memiliki hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian konstitusional dengan berlakunya UU Perkawinan, khususnya Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1), yaitu yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan dan hubungan hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan. Telah terjadi pelanggaran atas hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara Republik Indonesia, karena Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan tersebut bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Hal ini mengakibatkan pernikahan Pemohon yang telah dilakukan secara sah sesuai dengan agama yang dianut Pemohon tidak mendapatkan kepastian hukum sehingga menyebabkan pula anak



hasil pemikahan Pemohon juga tidak mendapatkan kepastian hukum pula; Jelas hak konstitusional dari anak telah diatur dan diakui dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Kenyataannya sejak lahirnya anak Pemohon telah mendapatkan perlakuan diskriminatif yaitu dengan dihilangkannya asal-usul dari anak Pemohon dengan hanya mencantumkan nama Pemohon dalam Akta Kelahirannya dan negara telah menghilangkan hak anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang karena dengan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya menyebabkan suami dari Pemohon tidak mempunyai kewajiban hukum untuk memelihara, mengasuh dan membiayai anak Pemohon. Tidak ada seorang anakpun yang dilahirkan di muka bumi ini dipersalahkan dan diperlakukan diskriminatif karena cara pemikahan yang ditempuh kedua orang tuanya berbeda tetapi sah menurut ketentuan norma agama. Dan, anak tersebut adalah anak yang sah secara hukum dan wajib diperlakukan sama di hadapan hukum;

Kenyataannya maksud dan tujuan diundangkannya UU Perkawinan berkaitan pencatatan perkawinan dan anak yang lahir dari sebuah perkawinan yang tidak dicatatkan, dianggap sebagai anak di luar perkawinan sehingga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya. Kenyataan ini telah memberikan ketidakpastian secara hukum dan mengganggu serta mengusik perasaan keadilan yang tumbuh dan hidup di masyarakat, sehingga merugikan Pemohon;

Kelahiran anak Pemohon ke dunia ini bukanlah suatu kehadiran yang tanpa sebab, tetapi sebagai hasil hubungan kasih-sayang antara kedua orang tuanya (Pemohon dan suaminya), namun akibat dari ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, menyebabkan suatu ketidakpastian hukum hubungan antara anak dengan bapaknya. Hal tersebut telah melanggar hak konstitusional anak untuk mengetahui asal-usulnya. Juga menyebabkan beban psikis terhadap anak dikarenakan tidak adanya pengakuan dari bapaknya atas kehadirannya di dunia. Tentu saja hal tersebut akan menyebabkan kecemasan, ketakutan dan ketidaknyamanan anak dalam pergaulannya di masyarakat;

15. Bahwa Pemohon secara objektif mengalami kerugian materi atau finansial, yaitu Pemohon harus menanggung biaya untuk kehidupan Pemohon serta



untuk membiayai dalam rangka pengasuhan dan pemeliharaan anak. Hal ini dikarenakan adanya ketentuan dalam UU Perkawinan yang menyebabkan tidak adanya kepastian hukum atas pernikahan Pemohon dan anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut. Akibatnya, Pemohon tidak bisa menuntut hak atas kewajiban suami memberikan nafkah lahir dan batin serta biaya untuk mengasuh dan memelihara anak.

Tegasnya, UU Perkawinan tidak mencerminkan rasa keadilan di masyarakat dan secara objektif-empiris telah memasung hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara Republik Indonesia untuk memperoleh kepastian hukum dan terbebas dari rasa cemas, ketakutan, dan diskriminasi terkait pernikahan dan status hukum anaknya. Bukankah Van Apeldoorn dalam bukunya *Inleiding tot de Rechtswetenschap in Nederland* menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk mengatur pergaulan hidup secara damai. Hukum menghendaki kedamaian. Kedamaian di antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia yang tertentu yaitu kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda dan lain sebagainya terhadap yang merugikannya. Kepentingan individu dan kepentingan golongan-golongan manusia selalu bertentangan satu sama lain. Pertentangan kepentingan-kepentingan ini selalu akan menyebabkan pertikaian dan kekacauan satu sama lain kalau tidak diatur oleh hukum untuk menciptakan kedamaian dengan mengadakan keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi, di mana setiap orang harus memperoleh sedapat mungkin yang menjadi haknya (Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, terjemahan *Inleiding tot de Studie van Het Nederlandse Recht* oleh Mr. Oetarid Sadino, Noordhoff-kalff N.V. Jkt. Cet. IV, 1958, hal. 13).

Norma konstitusi yang termaktub dalam UUD 1945 salah satunya mengandung tujuan hukum. Tujuan hukum dapat ditinjau dari teori etis (*etische theorie*) yang menyatakan hukum hanya semata-mata bertujuan mewujudkan keadilan. Kelemahannya adalah peraturan tidak mungkin dibuat untuk mengatur setiap orang dan setiap kasus, tetapi dibuat untuk umum, yang sifatnya abstrak dan hipotetis. Dan, kelemahan lainnya adalah hukum tidak selalu mewujudkan keadilan. Di sisi lain, menurut teori utilitis (*utilities theorie*), hukum bertujuan mewujudkan semata-mata apa



beralasan menurut hukum. Adapun Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*" adalah bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) yakni inkonstitusional sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Pokok permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

#### 5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

- Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;



- Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*", bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya;
- Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*", tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut **harus dibaca**, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*";
- Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
- Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal tiga belas, bulan Februari, tahun dua ribu dua belas** dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Jumat, tanggal tujuh belas, bulan Februari, tahun dua ribu dua belas**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida



Indrati, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

**KETUA,**

ttd.

**Moh. Mahfud MD.**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Achmad Sodiki**

ttd.

**Maria Farida Indrati**

ttd.

**Harjono**

ttd.

**Ahmad Fadlil Sumadi**

ttd.

**Anwar Usman**

ttd.

**Hamdan Zoelva**

ttd.

**M. Akil Mochtar**

ttd.

**Muhammad Alim**

## **6. ALASAN BERBEDA (*CONCURRING OPINION*)**

Terhadap Putusan Mahkamah ini, Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati memiliki alasan berbeda (*concurring opinion*), sebagai berikut:

**[6.1]** Perkawinan menurut Pasal 1 UU 1/1974 adalah "... ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan